

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PERTUMBUHAN EKONOMI,
ANGKATAN KERJA, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN DI DIY TAHUN 2009-2015**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:
KHUSNUL KHOTIMAH
14804241014

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PERTUMBUHAN EKONOMI,
ANGKATAN KERJA, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN DI DIY TAHUN 2009-2015**

SKRIPSI

Oleh:
KHUSNUL KHOTIMAH
14804241014

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 28 Juni 2018
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui
Dosen Pembimbing

Dr. Maimun Sholeh, M.Si.
NIP. 19660606 200501 1 002

PENGESAHAN


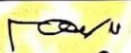

Skripsi yang berjudul:

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PERTUMBUHAN EKONOMI,
ANGKATAN KERJA, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN DI DIY TAHUN 2009-2015**

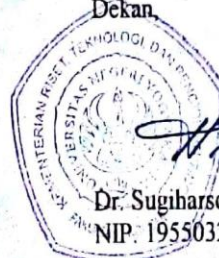
Oleh:
KHUSNUL KHOTIMAH
14804241014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 10 Juli 2018
dan dinyatakan telah lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Mustofa, S.Pd., M.Sc.	Ketua Penguji		19/7 2018
Dr. Maimun Sholeh, M.Si.	Sekretaris		20/7 2018
Tejo Nurseto, S.Pd., M.Pd.	Penguji Utama		16/7 2018

Yogyakarta, 20 Juli 2018
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan



Dr. Sugiharsono, M. Si.

NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 14804241014

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di DIY Tahun 2009-2015

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat-pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 28 Juni 2018

Penulis,



Khusnul Khotimah
NIM. 14804241014

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

(Qs. An-Najm [53]: 39)

“Hidup itu memang terkadang rumit, namun serumit apapun kehidupan ini tetap harus kita jalani, karena Tuhan punya rencana dibalik semua ini”.

(Jefri Al-Buchori)

“Jalani saja hidupmu karena ini hidupmu”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penulis persembahkan Tugas Akhir Skripsi ini untuk:

1. Bapak Tarjono dan Ibu Karisah kedua orangtua tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa dan dukungan baik moral maupun materiil.
2. Kakakku Sumiarti, Ismiah, dan Rusito yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat.

Selain itu, Tugas Akhir Skripsi ini juga saya bingkiskan untuk:

1. Keponakan-keponakan tante tercinta Hikmah Setiani, Eko Agus Susanto, Laeli Nur Rohmah, Khoerul Umam, Kanaya Eka Fitria, dan Lutfiah Dwi Nur Aini yang selalu menjadi obat penyemangat.
2. Ratna Fladira (*roommate*), Yulia Happy Kusumastuti (Ibu Kos), Yuslia Naili Rahmah (teman jalan), teman-teman kos Demangan, dan teman-teman kos E6 Karangmalang yang telah menjadi keluarga kedua saya di Jogja.

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PERTUMBUHAN EKONOMI,
ANGKATAN KERJA, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN DI DIY TAHUN 2009-2015**

Oleh:
Khusnul Khotimah
14804241014

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015 baik secara parsial maupun simultan.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa data sekunder dari 5 kabupaten/kota di DIY tahun 2009-2015. Analisis data yang digunakan dengan analisis regresi data panel model *Fixed Effect* yang diolah dengan menggunakan program stata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, angkatan kerja, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Tingkat pendidikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015, sedangkan angkatan kerja dan upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Secara simultan tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja dan upah minimum juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

Kata Kunci: Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Upah Minimum.

**THE EFFECTS OF EDUCATION, ECONOMIC GROWTH, LABOR FORCE,
AND MINIMUM WAGE ON UNEMPLOYMENT RATE
IN DIY IN 2009-2015**

By:
Khusnul Khotimah
14804241014

ABSTRACT

This study aims to determine the effects of education, economic growth, labor force, and minimum wage on unemployment rate in DIY year 2009-2015 either partially or simultaneously.

The method of this research uses a kind of causal associative research with quantitative approach. Data collection technique used documentary technique in the form of secondary data from 5 districts/ cities in DIY in 2009-2015. Data analysis used with regression analysis of Fixed Effect model panel data processed by using stata program.

The results showed that education, labor force, and minimum wage significantly effect the unemployment rate in DIY year 2009-2015. Education positively effect to unemployment rate in DIY year 2009-2015, while labor force and minimum wage have negative effect to unemployment rate in DIY year 2009-2015. Simultaneously the education, economic growth, labor force, and minimum wage also have a significant effect to unemployment rate in DIY year 2009-2015.

Keywords: *Unemployment Rate, Education, Economic Growth, Labor Force, Minimum Wage.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di DIY Tahun 2009-2015” dengan lancar. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan izin terkait administrasi.
3. Tejo Nurseto, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Prodi Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan bantuan dan motivasi.
4. Dr. Maimun Sholeh, M.Si. selaku Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan senantiasa memberikan masukan.
5. Sri Sumardiningsih, M.Si. dan Mustofa, S.Pd., M.Sc. selaku narasumber yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun.
6. Dr. Dra. Endang Mulyani, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.

8. Orang tua yang telah memberikan semangat, dorongan, dan bantuan baik moral maupun materiil.
9. Keluarga Pendidikan Ekonomi angkatan 2014 yang selama ini saling memberi dukungan, motivasi, masukan, dan doa.
10. Keluarga HMPE, Tim Advokasi FE UNY yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran yang sangat bermanfaat.
11. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan disebabkan oleh keterbatasan dan pengalaman dari penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap apa yang terkandung dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 28 Juni 2018
Penulis,



Khusnul Khotimah
NIM. 14804241014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori	14
1. Pengangguran	14
2. Tingkat Pendidikan	24
3. Pertumbuhan Ekonomi	28
4. Angkatan Kerja	35
5. Upah Minimum	39
B. Hasil Penelitian yang Relevan	44
C. Kerangka Berpikir	47
D. Hipotesis Penelitian	52
BAB III. METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Jenis Data dan Sumber Data	53
1. Jenis Data	53
2. Sumber Data	54
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	54
1. Variabel Penelitian	54
2. Definisi Operasional	55

D. Teknik Analisis Data	57
1. Alat Analisis Data	57
2. Uji Asumsi Klasik	60
3. Uji Signifikansi	63
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Deskripsi Data	66
1. Deskripsi Tingkat Pengangguran	67
2. Deskripsi Tingkat Pendidikan	69
3. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi	71
4. Deskripsi Angkatan Kerja	74
5. Deskripsi Upah Minimum	75
B. Analisis Data	76
1. Penentuan Metode Estimasi Data Panel	76
2. Uji Asumsi Klasik	82
3. Uji Signifikansi	85
4. Estimasi Model Regresi	90
C. Pembahasan	91
1. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015	91
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015	94
3. Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015	97
4. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015	100
6. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja dan Upah Minimum Secara Simultan terhadap Tingkat Pengangguran di DIY Tahun 2009-2015	102
D. Keterbatasan Penelitian	103
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	104
A. Simpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007-2017	2
2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	67
3. Tingkat Pengangguran Terbuka DIY per Kabupaten Tahun 2009-2015	67
4. Angka Melek Huruf DIY per Kabupaten Tahun 2009-2015	69
5. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) DIY per Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2015	72
6. TPAK DIY per Kabupaten Tahun 2009-2015	74
7. Nilai Upah Minimum Kabupaten di DIY Tahun 2009-2015	76
8. Pemilihan Model <i>Common Effect</i>	78
9. Pemilihan Model <i>Random Effect</i>	78
10. Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM)	79
11. Pemilihan Model <i>Fixed Effect</i>	80
12. Uji <i>Chow</i>	80
13. Uji <i>Hausman</i>	82
14. Hasil Uji Normalitas	83
15. Hasil Uji Multikoleniaritas	84
16. Hasil Uji Metode GLS (<i>Generalized Least Square</i>) dan Hasil Uji Metode SUR (<i>Seemingly Unrelated Regression</i>).....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kurva Phillips	43
2. Paradigma Penelitian	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Penelitian	113
2. Statistik Deskriptif	115
3. Model <i>Common Effect</i>	116
4. Model <i>Random Effect</i>	116
5. Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM)	116
6. Model <i>Fixed Effect</i>	117
7. Uji <i>Chow</i>	117
8. Uji <i>Hausman</i>	118
9. Uji Normalitas	118
10. Uji Multikoleniaritas	118
11. Metode GLS (<i>Generalized Least Square</i>)	119
12. Metode SUR (<i>Seemingly Unrelated Regression</i>)	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang mengalami masa peralihan dari yang awalnya hanya mengandalkan perekonomian di sektor agraris kini mulai mengembangkan diri di sektor industri. Selain itu Indonesia pada tahun 2017 juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor empat di dunia yaitu sebesar 257.912.349 jiwa (<https://tumoutounews.com>). Banyaknya jumlah penduduk ini menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah di bidang ekonomi dan sosial, yaitu pengangguran dan kemiskinan di mana jumlah penduduk yang terlalu besar tetapi tidak bisa diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan lapangan pekerjaan yang memadai. Pengangguran dan kemiskinan juga merupakan masalah ekonomi yang kompleks dan sulit untuk diatasi disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, seperti pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2011: 13), tingkat pendidikan (hasil penelitian Joko Suprayitno, dkk pada tahun 2015), angkatan kerja, dan upah (Kaufman dkk dalam Pujoalwanto, 2014: 114) yang dapat berakibat buruk terhadap perekonomian, politik, dan sosial.

Keadaan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yaitu dari sebesar 10,70% di tahun 2016 menjadi sebesar 10,12% di tahun 2017. Hal ini didukung oleh harga bahan pangan yang terjaga, upah buruh

tani dan bangunan yang meningkat, serta adanya bantuan beras dan Program Keluarga Harapan (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/15214516/bps-penduduk-miskin-turun>). Selain itu, tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2017 juga mengalami penurunan yaitu menjadi 5,5% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,61%. Penurunan ini disebabkan terjadi peningkatan persentase penduduk yang bekerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa kemasyarakatan. Namun jika dilihat dari jumlah pengangguran, terjadi kenaikan yaitu dari 7,03 juta jiwa menjadi 7,04 juta jiwa (<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/06/153940126>).

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007-2017

Tahun	TPT	Tingkat Kemiskinan
	(%)	(%)
2007	9,11	16,58
2008	8,39	15,42
2009	7,87	14,15
2010	7,14	13,33
2011	6,56	12,49
2012	6,14	11,66
2013	6,25	11,47
2014	5,94	10,96
2015	6,18	11,13
2016	5,61	10,70
2017	5,5	10,12

Sumber: BPS (2017), data diolah

Tingkat pengangguran di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan, tetapi mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 dan 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya perlambatan ekonomi di mana perusahaan mengurangi biaya produksinya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bertambahnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja

di sektor industri. Tingkat kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya juga terus terus mengalami penurunan, kecuali di tahun 2015 yang mengalami kenaikan disebabkan oleh tingginya laju inflasi, rata-rata harga beras secara nasional yang meningkat, harga eceran barang komoditi selain beras meningkat, dan upah buruh tani per hari mengalami penurunan (<https://www.antaranews.com>).

Meskipun tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2017, tetapi masalah pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pusat perhatian di beberapa provinsi di Pulau Jawa diantaranya Provinsi Banten dengan TPT sebesar 9,28% dan Provinsi Jawa Barat dengan TPT sebesar 8,22% yang memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa juga masih menjadi penyumbang terbesar untuk kenaikan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Pulau Jawa memiliki beberapa provinsi dengan tingkat pengangguran yang bervariasi. Bagi provinsi dengan tingkat pengangguran tinggi masalah pengangguran merupakan masalah yang harus diatasi dengan tepat agar terjadi penurunan tingkat pengangguran. Bagi provinsi dengan tingkat pengangguran rendah masalah pengangguran juga masih menjadi masalah yang harus cepat untuk diatasi, hal ini dilakukan untuk mencegah naiknya tingkat pengangguran. Misalnya provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat pengangguran rendah di Pulau Jawa tetapi masih berusaha untuk terus mengurangi tingkat penganggurannya dengan cara melakukan kegiatan pemagangan, peningkatan kompetensi, sertifikasi pekerja, dan program pelatihan keterampilan (<https://www.merdeka.com>). Sama

halnya juga di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berdasarkan data dari BPS tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 termasuk terendah secara nasional, yaitu berada di peringkat nomor 2 dari 34 provinsi di Indonesia dengan TPT sebesar 3,02 %. Meskipun secara nasional pengangguran di DIY termasuk rendah, namun tingkat pengangguran di DIY sendiri sebenarnya mengalami peningkatan yaitu dari 2,72% pada Agustus 2016 menjadi 3,02% pada Agustus 2017. Naiknya tingkat pengangguran di DIY disebabkan oleh adanya penduduk yang telah menyelesaikan pendidikannya selama setahun terakhir, namun masih banyak yang belum terserap dalam pasar kerja, selain itu adanya penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah bekerja pada lapangan usaha industri pengolahan konstruksi, perdagangan eceran, dan penyediaan minuman belum mendapatkan pekerjaan kembali. Untuk menangani hal tersebut pemerintah telah melakukan beberapa cara untuk mengurangi tingkat pengangguran seperti mengadakan pelatihan, peningkatan kompetensi, pemagangan dan melakukan kerjasama dengan perusahaan dari luar DIY.

Tingkat pengangguran DIY pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau Jawa termasuk yang terendah yaitu sebesar 4,07% dan tingkat pengangguran tertinggi berada di Provinsi Banten yaitu sebesar 9,55%. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki tingkat pengangguran yang hampir sama dengan Provinsi DIY yaitu berada di kisaran 4%. Tingkat pengangguran di DIY dari tahun 2009-2013 mengalami penurunan, namun di tahun 2014 dan 2015 mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi karena

meningkatnya jumlah angkatan kerja, di mana banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan belum dapat terserap dalam pasar kerja.

Salah satu variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan, di mana pendidikan seorang pekerja sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Sehingga untuk mendapatkan pekerjaan dibutuhkan pendidikan dan keahlian dari calon pekerja agar bisa terserap dalam dunia kerja (Iswahyudi Joko Suprayitno dkk, 2016). Tingkat pendidikan di DIY dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH). AMH adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Angka melek huruf di DIY pada tahun 2009-2015 terus meningkat yaitu pada tahun 2009 Angka Melek Huruf sebesar 90,18% dan pada tahun 2015 telah menjadi sebesar 94,5%. Namun, Angka Melek Huruf DIY ini masih termasuk rendah jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Apabila Angka Melek Huruf di DIY terus mengalami peningkatan seharusnya banyak angkatan kerja yang sudah memiliki modal pengetahuan dan keterampilan untuk diserap oleh lapangan pekerjaan. Namun yang masih menjadi masalah di DIY adalah banyak lulusan sekolah tetapi lapangan pekerjaan cenderung tetap bahkan berkurang. Selain itu kemampuan perusahaan di DIY dalam menyerap angkatan kerja juga tidak terlalu tinggi, sehingga menimbulkan

persaingan yang ketat pada proses mencari kerja di mana dapat menjadi salah satu penyebab pengangguran (Kaufman dkk dalam Pujoalwanto, 2014: 114).

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dari tahun 2009-2015 yang mengalami naik turun, dimana pada tahun 2009 TPAK sebesar 70,23% dan pada tahun 2015 TPAK sebesar 68,38%. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa TPAK DIY adalah tertinggi, yang berarti bahwa tingginya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian yang cukup tinggi dibandingkan provinsi lain. TPAK di DIY lebih tinggi daripada DKI Jakarta yang sebesar 66,39% dan Jawa Barat sebesar 60,34% yang terkenal sebagai pusat ekonomi dan industri.

Tingginya pasokan angkatan kerja yang ada DIY jika dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal mungkin akan terjadi peningkatan produksi yang nantinya akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Pujoalwanto, 2014:88). Menurut Mankiw dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2015 terus mengalami kenaikan, kecuali

di tahun 2014 dan 2015 yang mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan dari sisi produksi di mana terjadi penurunan karena disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terutama subkategori tananam pangan. Selain itu terjadi pertumbuhan negatif pada lapangan usaha yang mempunyai kontribusi besar dalam PDRB, seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil serta penyediaan akomodasi, dan perusahaan makanan dan minuman (<http://koran-sindo.com>). Pertumbuhan ekonomi di DIY tahun 2015 jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau Jawa merupakan paling rendah yaitu sebesar 4,94%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di DKI Jakarta yaitu sebesar 5,88%, Jawa Tengah sebesar 5,47%, dan Jawa Timur sebesar 5,44%.

Selain tingkat pendidikan, angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi variabel penyebab pengangguran, kekakuan upah dan efisiensi upah juga bisa menjadi penyebab pengangguran (Kaufman dkk dalam Pujoalwanto, 2014: 114). Upah adalah uang yang biasanya diterima oleh seorang pekerja atau buruh setelah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja. Penentuan upah tiap daerah berbeda-beda yang di dasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) daerah bersangkutan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jenis upah yang sekarang ini banyak dipakai adalah Upah Minimum di mana merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Pada tahun 2013 Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagai sistem pengupahan.

Berdasarkan data tahun 2009-2015 upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah DIY menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2009, Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan sebesar Rp700.000 per bulan, dan setiap tahun upah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 upah telah mencapai Rp988.500 per bulan. Jika dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa upah minimum di DIY merupakan yang terendah, sedangkan upah minimum tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp2.700.000 per bulan. Hal ini disebabkan oleh KHL di DKI Jakarta lebih besar dibandingkan KHL di DIY.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa meskipun DIY termasuk provinsi dengan tingkat pengangguran terendah secara nasional tetapi di DIY sendiri pada tahun 2017 mengalami kenaikan tingkat pengangguran, begitu pula selama kurun waktu 7 tahun dari tahun 2009-2015 tingkat pengangguran di DIY yang awalnya terus mengalami penurunan tetapi mengalami kenaikan kembali. Keadaan ini yang membuktikan bahwa tingkat pengangguran di DIY sebenarnya masih menjadi perhatian. Beberapa variabel seperti tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum dalam penelitian-penelitian sebelumnya menemukan pengaruh antara variabel-variabel tersebut terhadap tingkat pengangguran di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah beberapa variabel seperti tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum akan berpengaruh juga terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2015.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran beberapa provinsi di Pulau Jawa masih tergolong tinggi diantaranya Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana tingkat pengangguran di DIY masih mengalami fluktuasi.
2. Tingkat pengangguran di DIY masih didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi, yaitu lulusan SMA sebesar 8,29% dan SMK sebesar 11,41%.
3. Pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi.
4. TPAK di DIY terus mengalami kenaikan, sedangkan lapangan pekerjaan di DIY cenderung tetap bahkan berkurang.
5. Upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada masalah tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2015 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan Upah Minimum. Variabel-variabel ini diambil dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran seperti pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kurangnya keterampilan, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya

informasi, inflasi, investasi, upah minimum, dan jumlah penduduk. Namun, dalam penelitian ini hanya mengambil 4 variabel karena peneliti beranggapan bahwa tingkat pendidikan perlu diteliti karena DIY dikenal sebagai kota pelajar dengan tingkat pendidikan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang termasuk terendah di Pulau Jawa, angkatan kerja (TPAK) DIY termasuk tertinggi di Pulau Jawa, dan peneliti ingin mengetahui pengaruh UMK yang baru dijalankan pemerintah pada tahun 2013 terhadap tingkat pengangguran di DIY. Peneliti mengambil tahun 2009-2015, karena pada tahun 2009-2015 merupakan tahun di mana tingkat pengangguran di DIY yang awalnya terus mengalami penurunan, namun setelah tahun 2013 tingkat pengangguran mengalami kenaikan kembali. Sehingga dari data tahun tersebut dapat diteliti apakah beberapa variabel seperti tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di DIY Tahun 2009-2015?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di DIY Tahun 2009-2015?

3. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di DIY Tahun 2009-2015?
4. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di DIY Tahun 2009-2015?
5. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum secara simultan terhadap tingkat pengangguran di DIY Tahun 2009-2015?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di DIY Tahun 2009-2015.
2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di DIY Tahun 2009-2015.
3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di DIY Tahun 2009-2015.
4. Mengetahui ada tidaknya pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di DIY Tahun 2009-2015.
5. Mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum secara simultan terhadap tingkat pengangguran di DIY Tahun 2009-2015.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat yang diharapkan penulis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama penelitian mengenai tingkat pengangguran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Peneliti mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di DIY Tahun 2009-2015.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai tingkat pengangguran dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015, dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan yang tepat dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terutama yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja dan Upah Minimum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang biasa dialami oleh negara berkembang seperti Indonesia. Pengangguran juga merupakan masalah yang selama ini penanggulangannya sangat sulit untuk dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah telah melakukan berbagai cara dan program untuk mengurangi tingkat pengangguran, namun hasilnya tingkat pengangguran di Indonesia setiap tahunnya masih mengalami naik turun. Hingga tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,5% atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,61% pada tahun 2016.

a. Definisi Pengangguran

Pengangguran secara umum adalah orang yang tidak bekerja atau tidak ikut andil dalam suatu produksi. Menurut BPS pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak atau sedang mempersiapkan usaha mandiri. Pengangguran biasanya disebabkan bukan hanya karena keinginan dari dalam diri seseorang (sukarela) tetapi juga karena keadaan

(terpaksa). Lapangan pekerjaan yang kurang memadai menjadikan banyak angkatan kerja yang seharusnya produktif menjadi pengangguran. Dengan keadaan Indonesia saat ini, jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menyebabkan jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Menurut Sukirno (2011: 327) pengangguran merupakan masalah yang kompleks karena disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan memiliki beberapa efek buruk terhadap perekonomian, politik, dan sosial. Misalnya dengan banyaknya pengangguran maka produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang dan akibat lainnya akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Pengangguran merupakan masalah yang sangat serius dan merupakan tugas berat bagi pemerintah untuk mengatasinya. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja:

Pengangguran merupakan masalah nasional dan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Penanggulangan masalah pengangguran harus dilakukan oleh semua *stakeholders* terkait secara bersamaan dan terintegrasi antar lintas sektor dan masyarakat dengan cara mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Jadi pengangguran dapat didefinisikan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan dan atau sedang menyiapkan usaha mandiri. Pengangguran juga

merupakan masalah yang kompleks maka apabila masalah ini tidak kunjung diselesaikan maka akan menimbulkan efek yang lebih buruk bagi perekonomian, politik, dan sosial.

Di Indonesia setiap daerah memiliki perkembangan jumlah pengangguran yang berbeda-beda. Perkembangan pengangguran di setiap daerah dapat dilihat berdasarkan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah persentase dari perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja (Payaman, 1985: 3). Selain itu, untuk mengetahui perkembangan pengangguran suatu daerah juga bisa didasarkan pada pendekatan pemanfaatan tenaga kerja seperti yang dinyatakan oleh Kusnendi (2015: 3.46-3.47) antara lain;

1) bekerja penuh yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya telah mencapai 35 jam ke atas per minggu, 2) setengah menganggur yaitu mereka yang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara penuh atau bekerja kurang dari 35 jam/minggu, 3) menganggur yaitu suatu keadaan ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan.

b. Jenis-jenis Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah serius yang banyak dialami oleh berbagai negara terutama negara berkembang. Oleh karena itu pengangguran selalu masuk dalam pembahasan rencana pembangunan ekonomi suatu negara yang dikaitkan dengan tujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran. Pengangguran terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor berbeda sehingga pengangguran dapat digolongkan

berdasarkan penyebab dan cirinya. Menurut Kusnendi (2003: 7.27-7.28) pengangguran terdapat dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu; 1) pengangguran friksional terjadi karena adanya hambatan untuk terjadinya pertemuan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, 2) pengangguran siklis terjadi karena naik turunnya kegiatan ekonomi, 3) pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian, 4) pengangguran musiman terjadi karena disebabkan oleh perubahan musim/iklim, dan 4) pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia tergantikan oleh mesin.

Pengangguran tidak hanya dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya tetapi juga dapat dibedakan berdasarkan cirinya yaitu: 1) pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang menyiapkan usaha mandiri, 2) pengangguran tersembunyi terjadi apabila jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien, dan 3) setengah menganggur adalah keadaan di mana pekerja hanya bekerja satu hingga dua hari selama seminggu, atau satu hingga empat jam sehari.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah pengangguran maka harus diketahui terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran tersebut. Kaufman dan Hotchkiss dalam (Pujoalwanto, 2014: 114) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran sebagai berikut; 1) proses mencari kerja, 2) kekakuan upah, dan 3) efisiensi upah.

Proses mencari kerja merupakan faktor yang mempengaruhi pengangguran karena dengan munculnya angkatan kerja baru akan menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Setiap perusahaan dalam menawarkan pekerjaan selalu memberikan kualifikasi tertentu yang harus dimiliki oleh pencari kerja, apabila pencari kerja tidak bisa memenuhi syarat maka akan tersingkir dari dunia kerja dan menjadi pengangguran.

Kekakuan upah dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pengangguran. Penurunan pada proses produksi dalam perekonomian akan mengakibatkan pergeseran atau penurunan pada permintaan tenaga kerja. Akibatnya, akan terjadi penurunan besarnya upah yang ditetapkan. Dengan adanya kekakuan upah, dalam jangka pendek, tingkat upah akan mengalami kenaikan pada tingkat upah semula. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran (*excess supply*) pada tenaga kerja dan mengakibatkan pengangguran.

Efisiensi upah juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengangguran. Semakin tinggi perusahaan membayar upah maka akan semakin keras usaha para pekerja untuk bekerja. Hal ini justru akan memberikan konsekuensi yang buruk jika perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi lebih tinggi maka akan terjadi pengangguran terpaksa akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengangguran menurut Sukirno (2011:13) adalah kekurangan pengeluaran agregat. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi ini juga akan menambah penggunaan tenaga kerja, dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan semakin tinggi juga pendapatan nasional. Jika semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian semakin rendah tingkat pengangguran. Umumnya pengeluaran agregat akan terwujud dalam perekonomian adalah lebih rendah dari pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan permintaan agregat dapat menimbulkan pengangguran.

Angkatan kerja dan tingkat pendidikan juga bisa menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran. Menurut Kusnendi (2015: 2.26) angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian sehingga perlu adanya penciptaan atau

perluasan kesempatan pekerjaan. Penawaran tenaga kerja selalu mengalami peningkatan sedangkan tambahan permintaan tenaga kerja lebih kecil dan tidak didukung juga dengan penciptaan lapangan pekerjaan maka akibatnya sebagian angkatan kerja tidak memperoleh pekerjaan dan akan meningkatkan tingkat pengangguran. Penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu masalah penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, tetapi bukan hanya masalah penciptaan lapangan pekerjaan, kualitas tenaga kerja Indonesia juga perlu untuk diperhatikan. Pengetahuan dan keterampilan angkatan kerja sekarang ini juga sangat diperlukan agar angkatan kerja dapat terserap dalam dunia kerja.

Menurut Siswoyo dkk (2013: 18) dari sudut ekonomi, pendidikan dapat dipandang sebagai *human investment*, karena dengan pendidikan maka manusia terdidik dapat menjadi modal (modal manusia/*human capital*) bagi pembangunan. Manusia terdidik atau disebut angkatan kerja yang berpengetahuan dan memiliki keterampilan yang memadai akan bisa masuk dalam dunia kerja dan membantu pertumbuhan ekonomi. Lembaga pendidikan juga memiliki fungsi untuk mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Jika proses perjalanan pendidikan sepanjang masa ditinjau secara menyeluruh, maka dapat dilihat kenyataan bahwa kemajuan dalam pendidikan beriringan dengan kemajuan ekonomi secara bersamaan. Peserta didik yang menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan

pekerjaan. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin besar kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Jadi berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, tingkat pengangguran dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja dan upah minimum.

d. Perhitungan Tingkat Pengangguran

Untuk mengetahui perkembangan pengangguran atau tinggi rendahnya pengangguran suatu negara yaitu dengan menghitung tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan (Mankiw, 2012: 111). Menurut Badan Pusat Statistik untuk mengukur jumlah pengangguran yaitu dengan menghimpun data pengangguran dan aspek-aspek pasar tenaga kerja lain, seperti jenis pekerjaan, jam kerja rata-rata, dan durasi pengangguran. Setelah itu dibuat tiga kategori yaitu kategori bekerja, pengangguran, dan bukan angkatan kerja. Setelah dikelompokkan ke dalam tiga kategori tersebut, kemudian menghitung berbagai statistik untuk merangkum kondisi angkatan kerja dengan rumus:

Angkatan Kerja= jumlah orang yang bekerja+jumlah yang tidak bekerja

Setelah diketahui angkatan kerja, kemudian menghitung tingkat pengangguran menurut Kusnendi (2015: 3.38) dengan rumus:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{jumlah pencari kerja}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

e. Kebijakan Untuk Mengatasi Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah serius yang perlu dilakukan penanggulangan serta perlu adanya pembuatan program maupun kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Menurut Mankiw (2012: 119) banyak program pemerintah yang berupaya untuk memudahkan pencarian kerja, seperti melalui badan penempatan kerja yang dijalankan oleh pemerintah yang menyiarkan informasi tentang lowongan kerja dan melalui program-program pelatihan umum yang mempermudah transisi pekerja dari industri yang merosot menuju industri yang berkembang.

Untuk mengatasi pengangguran pemerintah juga telah membuat kebijakan seperti kebijakan perluasan kesempatan kerja yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2013. Jumlah angkatan kerja yang terus bertambah harus diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai agar tidak terjadi kenaikan tingkat pengangguran. Perluasan lapangan kerja harus dilaksanakan oleh kerjasaman antara badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta melalui program kewirausahaan. Program kewirausahaan yang dilakukan dengan pola pembentukan, seperti pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela.

Kenaikan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran

masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Ukuran kasar dari kemakmuran masyarakat adalah pendapatan per kapita yang diperoleh dengan cara membagikan pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Dengan demikian kesempatan kerja yang semakin meningkat dan tingkat pengangguran yang turun bukan saja menambah pendapatan nasional tetapi juga meningkatkan pendapatan per kapita. Melalui perubahan ini kemakmuran masyarakat akan bertambah.

Untuk mengurangi tingkat pengangguran juga bisa dilakukan dengan memperbaiki pembagian pendapatan. Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Maka semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Seterusnya tingkat pengangguran yang terlalu tinggi cenderung untuk mengekalkan atau menurunkan upah golongan berpendapatan rendah. Sebaliknya, pada kesempatan kerja yang tinggi tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha menaikkan kesempatan kerja dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat.

Banyak cara atau kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran, namun berhasil atau tidaknya tergantung pada semua instrument yang menjalankannya. Apabila kebijakan tersebut dapat dijalankan secara maksimal dan semua pihak yang terlibat saling bekerja sama dalam mewujudkan kebijakan tersebut maka program penurunan tingkat pengangguran akan berhasil.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat menjadi faktor penyebab pengangguran, karena sekarang ini untuk masuk ke dalam dunia kerja pencari kerja harus memiliki kelebihan pengetahuan maupun keterampilan. Apabila pencari kerja tidak memiliki tingkat pendidikan yang memadai maka akan tersingkir dari dunia kerja dan menaikkan tingkat pengangguran.

a. Konsep Pendidikan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Wina Sanjaya (2006: 2-3) terdapat empat konsep pendidikan; 1) pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, 2) proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran, 3) suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya, 4) akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan juga merupakan salah satu dari empat tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan merupakan tugas negara dan menjadi tujuan penting suatu negara. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan masa depan suatu bangsa, pendidikan menjadi salah satu penentu kemajuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan, bakat dan minat seseorang yang disesuaikan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar bagi

anak usia sekolah dasar yaitu umur 7-12 tahun yang bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup secara mandiri di dalam masyarakat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Menurut Undang-undang Sisdiknas 2003, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pelaksanaan pendidikan dasar dua belas tahun merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi tuntutan dunia kerja. Dalam dunia kerja dituntut persyaratan kualitas serta pengetahuan dari pelamar kerja, sehingga dengan basis pendidikan dua belas tahun tentunya dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja yang lebih baik.

b. Tujuan Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Pendidikan yang diselenggarakan oleh negara bertujuan agar warga negaranya mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai bekal untuk melamar pekerjaan. Semakin banyak orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akan semakin banyak pula yang terserap menjadi tenaga kerja dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi akan

menjadikan sumber daya manusia berkualitas dan memberikan efektivitas produksi yang akhirnya dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru.

c. Perhitungan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Hasbullah (2001: 63) faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan adalah ideologi, sosial ekonomi, sosial budaya, perkembangan IPTEK, dan psikologi. Tingkat dan kualitas pendidikan suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan besarnya Angka Melek Huruf. Melek Huruf adalah kemampuan membaca dan menulis, sedangkan Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Rumus perhitungan angka melek huruf adalah sebagai berikut:

$$\text{Angka Melek Huruf} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

a = jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis.

b = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

Apabila angka melek huruf suatu daerah tinggi maka dapat dikatakan bahwa pendidikannya sudah baik. Angka Melek Huruf biasanya digunakan untuk melihat pencapaian oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan dan untuk mengetahui sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Untuk mendapatkan pekerjaan juga dibutuhkan pendidikan dan keahlian dari calon pekerja agar bisa terserap dalam dunia kerja. Jadi, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah.

3. Pertumbuhan Ekonomi

a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan dapat bermakna pada dua hal, yaitu baik dan buruk, jika pada suatu waktu perekonomian mengalami pertumbuhan, maka kegiatan ekonomi berkesan baik. Tetapi jika suatu waktu perekonomian mengalami penurunan, berarti kegiatan ekonomi berkesan buruk. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Hal inilah membuat pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi dambaan semua negara.

Menurut Pujoalwanto (2014:88) pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Proses kenaikan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian terjadi secara bertahap dan memerlukan faktor pendorong seperti modal, sumber daya manusia, dan teknologi, seperti yang dinyatakan oleh Prof Simon Kuznet dalam (Jhigan, 2014: 57) yang mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan menyesuaikan dengan kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen; 1) pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus penyediaan barang, 2) teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk, 3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana terjadi perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya produksi barang dan jasa, semakin banyak jenis barang ekonomi yang diproduksi, terserapnya angkatan kerja, dan meningkatnya kemakmuran masyarakat.

b. Faktor-faktor yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Sedangkan faktor nonekonomi yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi berupa lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik, dan kelembagaan. Menurut Sukirno (2011: 429) ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

1) Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi tanah, keadaan iklim dan cuaca, hasil hutan, hasil laut, dan barang tambang. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Peranan penanaman barang-barang pertanian untuk ekspor, dan industri pertambangan minyak menjadi penggerak permulaan bagi pertumbuhan ekonomi.

2) Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja

Pertambahan jumlah penduduk menjadi pendorong pada perkembangan ekonomi. Jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja di mana memungkinkan negara untuk menambah produksi. Disamping itu dengan adanya pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk menjadi semakin berkualitas. Perkembangan penduduk juga menyebabkan besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan, sehingga akan menimbulkan dorongan kepada pertambahan dalam produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi.

3) Barang-barang Modal dan Tingkat Teknologi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi. Barang-barang modal yang bertambah jumlahnya, dan teknologi yang terus berkembang memegang peranan yang penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan tercapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada masa kini.

4) Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai di mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud apabila suatu negara dapat mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki dengan tepat. Pemerintah harus bisa mendorong sikap dan sistem sosial dalam masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi juga harus didukung dengan kelembagaan dan kebijakan yang baik.

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal yang sudah lama dibahas oleh ahli-ahli ekonomi. Terutama pada zaman ahli-ahli ekonomi Klasik banyak pendapat tentang pertumbuhan ekonomi telah dikemukakan. Buku Adam Smith yang terkenal yaitu *An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations* atau *The Wealth of Nations*, merupakan suatu analisis mengenai sebab-sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (2011: 432) ada beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

1) Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Menurut ahli-ahli ekonomi Klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertumbuhannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Pertumbuhan Klasik telah dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Maka penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

2) Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang baru, mempertinggi efisiensi cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasar-pasar yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Menurut Schumpeter makin tinggi

tingkat kemajuan suatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya.

Selain teori pertumbuhan klasik dan teori Schumpeter ada teori pertumbuhan ekonomi lain menurut Todaro (2003: 129), yaitu teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa setiap perekonomian pada dasarnya harus senantiasa mencadangkan atau menabung sebagian tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal (gedung, alat-alat, dan bahan baku) yang telah susut atau rusak. Agar tumbuh dengan pesat, maka setiap perekonomian haruslah menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin bagian dari GNP-nya. Semakin banyak yang dapat ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan perekonomian akan semakin cepat.

d. Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan melihat tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara perlu dihitung pendapatan nasional riil, yaitu Produk Nasional Bruto riil atau Produk Domestik Bruto riil. Dalam perhitungan pendapatan nasional komponennya adalah menurut harga tetap, yaitu pada harga-harga barang yang berlaku di tahun dasar

yang dipilih. Perhitungan pendapatan nasional memungkinkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara langsung dapat dihitung dari data pendapatan nasional riil yang tersedia, dengan rumus:

$$g = \frac{PN\text{-}riil_1 - PN\text{-}riil_0}{PN\text{-}riil_0} \times 100$$

Keterangan:

g = tingkat pertumbuhan ekonomi

$PN\text{-}riil_1$ = pendapatan nasional untuk tahun yang akan dihitung

$PN\text{-}riil_0$ = pendapatan nasional pada tahun sebelumnya

Apabila suatu negara tidak melakukan perhitungan pendapatan nasional menurut harga tetap, untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi perhitungan harus dilakukan dengan dua tahap: 1) menghitung pendapatan nasional riil dengan mendeflasikan pendapatan nasional pada harga masa ini, dan 2) menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, dengan rumus:

$$PN\text{-}riil_n = \frac{HI_0}{HI_n} \times PN \text{ masa ini}$$

Keterangan:

$PN\text{-}riil_n$ = pendapatan nasional riil tahun n

HI_0 = indeks harga tahun sebelumnya

HI_n = indeks harga tahun n

$PN \text{ masa ini}$ = pendapatan nasional pada tahun n

4. Angkatan Kerja

Salah satu faktor produksi yang sangat penting adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, tidak semua sumber daya manusia dapat digunakan dalam kegiatan produksi tetapi ada beberapa ketentuan seperti batasan usia. Sumber daya manusia yang digunakan dalam kegiatan produksi biasanya disebut sebagai angkatan kerja. Apabila jumlah angkatan kerja besar akan menambah jumlah tenaga produktif yang digunakan dalam kegiatan produksi. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Menurut Pujoalwanto (2014: 108) angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang termasuk penduduk usia kerja atau produktif yang berusia 15-64 tahun baik yang sudah memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan maupun sedang mempersiapkan usaha baru. Banyak sedikitnya angkatan kerja tergantung pada komposisi jumlah penduduk. Apabila golongan usia kerja mengalami kenaikan maka jumlah angkatan kerja pun akan bertambah. Angkatan kerja yang banyak diharapkan akan mampu memicu peningkatan kegiatan ekonomi yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan angkatan kerja suatu negara dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi jumlah angkatan kerja dari jumlah tenaga kerja. Untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja menggunakan rumus:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$$

Jumlah angkatan kerja yang banyak tidak selalu berdampak positif terhadap kesejahteraan. Apabila pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan seiring dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja, maka akan terjadi peningkatan tingkat pengangguran. Dalam dunia ketenagakerjaan, Indonesia memiliki banyak masalah yang harus ditangani dan diatasi oleh pemerintah, seperti perluasan lapangan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan kerja, penyebaran tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja.

Masalah perluasan lapangan pekerjaan merupakan masalah yang sangat mendesak. Selama ini sebenarnya sudah cukup banyak diciptakan lapangan pekerjaan, namun angkatan kerja bertambah melebihi kemampuan penciptaan lapangan kerja, sehingga jumlah pengangguran dan setengah menganggur masih cukup besar. Angkatan kerja Indonesia diperkirakan akan bertambah dan terus bertambah. Sebagian besar terdiri dari angkatan kerja usia muda, dan wanita berpendidikan relatif tinggi (sekolah menengah). Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru diberbagai sektor untuk dapat menampung pertumbuhan angkatan kerja yang semakin banyak. Selain perluasaan lapangan pekerjaan, mutu dan kemampuan dari angkatan kerja juga harus diperbaiki dan dikembangkan.

Mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan tergolong masih rendah. Untuk meningkatkannya telah dilakukan berbagai

program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan teknologi agar dapat didayagunakan secara efektif dan semaksimal mungkin. Dalam era modernisasi peningkatan mutu dan kemampuan kerja tidak hanya berkaitan dengan besarnya jumlah angkatan kerja yang harus dididik dan dilatih, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian serta kualitas hasil pendidikan dan latihan dengan kebutuhan lapangan kerja dan persyaratan kerja. Menyadari akan masih rendahnya mutu tenaga kerja Indonesia maka diperlukan akan adanya peningkatan pendidikan formal, baik yang bersifat umum maupun kejuruan dalam upaya membangun dan mengembangkan pengetahuan, bakat, kepribadian dan sikap mental, kreatifitas penalaran dan kecerdasan seseorang. Di samping pendidikan formal, jalur latihan kerja juga sangat penting peranannya dalam peningkatan mutu tenaga kerja Indonesia. Latihan kerja merupakan proses pengembangan keahlian dan keterampilan kerja yang langsung dikaitkan dengan pekerjaan dan persyaratan kerja.

Selain itu, penyebaran tenaga kerja juga menjadi masalah dalam ketenagakerjaan. Penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja, telah dikembangkan melalui berbagai program dan kebijakan yang tujuan untuk meningkatkan pendayagunaan serta penyebaran tenaga kerja yang lebih merata baik secara sektoral maupun regional. Secara sektoral pembangunan sektor-sektor di luar sektor pertanian terus ditingkatkan untuk dapat memperbesar peranannya baik menghasilkan nilai lebih atau penyerapan tenaga kerja. Untuk

maksud penyebaran tenaga kerja secara regional, kebijakan dan program yang dikembangkan antara lain program kerja antardaerah, transmigrasi, pengupahan dan sebagainya. Sedang untuk penyebaran tenaga kerja secara sektoral dilakukan melalui latihan kerja dan permagangan.

Masalah yang tidak kalah penting yaitu mengenai masalah perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja yang dimaksudkan agar tenaga kerja dapat bekerja lebih produktif, sehat dan sejahtera, sehingga mereka dapat hidup layak bersama keluarganya. Hal ini penting mengingat perubahan struktur ekonomi dan lapangan kerja yang semakin cepat akan membawa dampak negatif bagi tenaga kerja, di mana perubahan tersebut tidak memihak kepada tenaga kerja. Para tenaga kerja sering merasa dirugikan ataupun dieksploitasi oleh pemimpin atau para pengusaha yang semena-mena menetapkan kebijakan bagi para karyawan maupun para buruh, minimnya upah dan jaminan akan keselamatan kerja sering menjadi masalah dalam dunia tenaga kerja Indonesia. Perlu adanya peningkatan kondisi lingkungan kerja dimaksudkan untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan produktif sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 apabila tenaga kerja dapat hidup layak, maka motivasi dan produktivitas kerjanya akan meningkat.

5. Upah Minimum

Upah adalah uang yang biasanya diterima oleh seorang pekerja atau buruh setelah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja.

Besarnya upah yang diberikan kepada pekerja berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dan perjanjian kerja. Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah disebutkan bahwa upah terdiri dari beberapa komponen seperti:

a. Upah Pokok

Merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.

b. Tunjangan Tetap

Suatu pembayaran yang teratur yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kehamilan, tunjangan makan, dan tunjangan transport.

c. Tunjangan Tidak Tetap

Suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.

Dalam menentukan upah untuk pekerja/buruh, pemberi kerja menggunakan sistem upah yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pekerja. Menurut Gilarso (2001: 216), sistem upah yang digunakan untuk memberi upah kepada pekerja/buruh ada enam, yaitu:

a. Upah Menurut Prestasi

Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu.

b. Upah Waktu

Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan.

c. Upah Borongan

Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja.

d. Upah Premi

Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi “normal” berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, pekerja tersebut diberi “premi”.

e. Upah Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga.

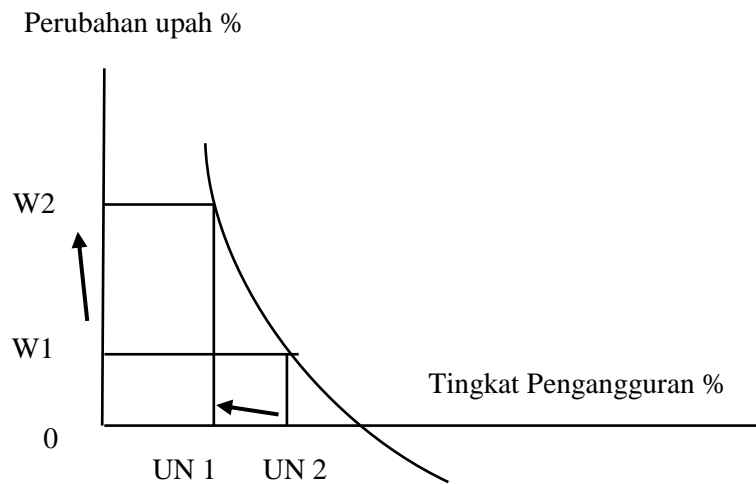
f. Upah Gaji Pegawai Negeri

Gaji Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip: pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.

Upah yang digunakan oleh setiap daerah biasanya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan peraturan daerah masing-masing. Upah yang biasa digunakan adalah upah minimum yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomer: PER-01/MEN/1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum juga memiliki beberapa jenis, seperti: 1) Upah Minimum Provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi, 2) Upah Minimum Kabupaten/Kota, yaitu upah minimum yang berlaku Daerah Kabupaten/Kota, 3) Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektorial di seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi, dan 4) Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektorial di Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Kusnendi (2015: 3.40-3.41) konsep tingkat pengangguran alamiah dikembangkan oleh pakar ekonomi bernama A. W. Phillips yang

mengemukakan temuan penelitiannya tentang hubungan antara perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran. Menurut Phillips ada hubungan yang negatif antara persentase kenaikan upah dan tingkat pengangguran. Ketika tingkat kenaikan upah tinggi, pengangguran cenderung rendah dan ketika tingkat kenaikan upah rendah, pengangguran cenderung tinggi. Hubungan negatif antara tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran hingga kini dikenal sebagai kurva Phillips.



Gambar 1. Kurva Phillips

Salah satu jenis Upah Minimum yang dipakai di DIY adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), namun sekarang DIY menggunakan UMK sebagai sistem pengupahan karena digunakan untuk mengurangi kesenjangan di masing-masing kabupaten dan kota. UMK adalah upah minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. Setiap penerapan Upah Minimum yang dilakukan pemerintah pada suatu daerah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya jumlah pengangguran karena besarnya penyediaan dan permintaan tenaga

kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Dalam teori ekonomi neoklasik diasumsikan bahwa penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan berubah bila tingkat upah berubah.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dijadikan referensi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nina Cahyani (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Nina Cahyani berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, Inflasi, dan Investasi Terhadap Jumlah Pengangguran di DIY Tahun 1986-2015”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, inflasi dan investasi terhadap jumlah pengangguran di DIY tahun 1986-2015. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di DIY tahun 1986-2015; (2) upah minimum regional berpengaruh positif terhadap jumlah pengangguran di DIY tahun 1986-2015; (3) inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah pengangguran di DIY tahun 1986-2015; (4) investasi berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran di DIY tahun 1986-2015.

2. Febryana Rizqi Wasilaputri (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Febryana Rizqi Wasilaputri berjudul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, PDRB dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2010-2014. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model regresi *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, serta upah minimum provinsi, PDRB, dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

3. Moch Heru Anggoro (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Moch Heru Anggoro berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Surabaya”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kota Surabaya yang berbanding terbalik atau berlawanan. Sedangkan variabel pertumbuhan angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Surabaya. Sementara kedua variabel independen yakni pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan angkatan kerja secara bersama-sama menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Surabaya.

4. Iswahyudi Joko Suprayitno dkk (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudi Joko Suprayitno dkk berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kota Semarang”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah pengangguran di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seorang pekerja sangat berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Kota Semarang. Nilai koefisien regresi variabel jumlah penduduk yang berpendidikan (dari SD sd S1) (b_2) bernilai positif artinya setiap peningkatan jumlah penduduk yang berpendidikan (dari SD sd S1) sebesar 1 maka jumlah pengangguran juga meningkat sebesar 0,201 jiwa dengan asumsi nilai independen lain nilainya tetap. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan dibutuhkan pendidikan dan keahlian dari calon pekerja agar bisa terserap dalam dunia kerja.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel yang digunakan, beberapa variabel yang telah

digunakan peneliti terdahulu akan diteliti kembali pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran oleh peneliti seperti variabel tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan upah minimum. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel yang digunakan, variabel yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggabungkan variabel dari beberapa penelitian yang berbeda sehingga diperoleh variabel tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan upah minimum. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada teknik analisis datanya di mana penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, sedangkan peneliti menggunakan teknik analisis regresi data panel.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran arah penelitian, dan dibuat guna memudahkan penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015

Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan dan atau sedang menyiapkan usaha baru. Tingkat pengangguran di DIY dari tahun 2009-2015 mengalami naik turun. Pada tahun 2009 tingkat pengangguran sebesar 6% dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2013. Namun setelah tahun 2013 tingkat pengangguran di DIY terus mengalami kenaikan sampai tahun 2015.

Pengangguran terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan seperti tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum. Faktor-faktor ini juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan masa depan suatu bangsa dan dapat menjadi penentu kemajuan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dapat dipandang sebagai *human investment*, karena dengan pendidikan maka manusia terdidik dapat menjadi modal (modal manusia/*human capital*) bagi pembangunan ekonomi. Tingkat pendidikan suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan angka melek huruf. Apabila angka melek huruf suatu negara tinggi maka dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tersebut maka para pencari kerja dapat terserap dalam lapangan pekerjaan dan bahkan mampu menciptakan lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran juga akan turun. Sedangkan apabila tingkat pendidikan rendah maka dapat dikatakan bahwa tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakatnya rendah, padahal sekarang ini perusahaan ataupun pemberi kerja memberikan kriteria tertentu kepada pencari kerja. Apabila mereka tidak bisa memenuhi kriteria yang

diberikan maka mereka tidak akan terserap dalam lapangan pekerjaan yang ada dan hanya akan menaikkan tingkat pengangguran.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015

Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana terjadi perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya produksi barang dan jasa dan meningkatnya kemakmuran masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara perlu dihitung pendapatan nasional riil, yaitu Produk Nasional Bruto riil atau Produk Domestik Bruto riil. Setiap ada peningkatan persentase pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menyerap tenaga kerja, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berorientasi pada padat karya akan memberikan kesempatan kerja lebih besar terhadap pekerja sehingga dengan demikian tingkat pengangguran dapat turun. Apabila pertumbuhan ekonomi rendah berarti terjadi penurunan dalam produksi barang dan jasa yang diakibatkan oleh kekurangan pengeluaran agregat. Akibat dari penurunan produksi barang dan jasa, pengusaha dan pabrik akan mengurangi bebannya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga mengakibatkan naiknya tingkat pengangguran.

4. Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau produktif yang berusia 15-64 tahun baik yang sudah memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan maupun sedang mempersiapkan usaha baru. Angkatan kerja yang banyak diharapkan akan mampu memicu peningkatan kegiatan ekonomi karena produksi barang dan jasa dapat meningkat dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya terus bertambah. Selain itu apabila produksi bertambah maka membutuhkan banyak pekerja untuk proses produksi, sehingga angkatan kerja dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran. Namun, jumlah angkatan kerja yang banyak cenderung akan menaikkan tingkat pengangguran apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai.

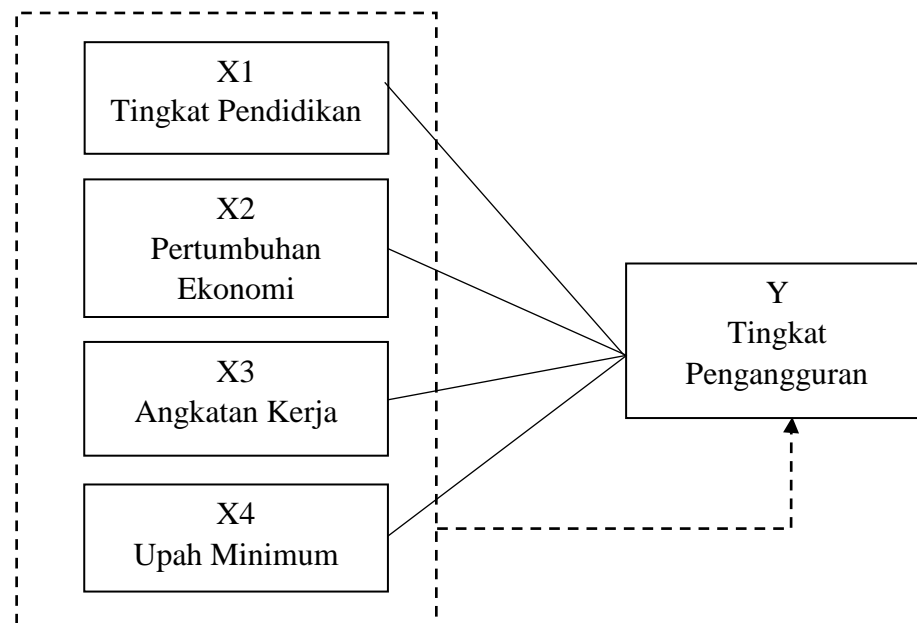
5. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Salah satu jenis Upah Minimum yang dipakai di DIY sekarang adalah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Upah minimum berpengaruh penting terhadap tingkat pengangguran yang tinggi. Ketika peraturan upah minimum dinaikkan, maka peraturan tersebut akan mengakibatkan jumlah penawaran tenaga kerja bertambah dan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja. Kemudian akan mengakibatkan kelebihan tenaga kerja karena jumlah pekerja yang ingin bekerja lebih banyak daripada

jumlah lapangan pekerjaannya dan akhirnya sebagian pekerja menganggur atau tidak memiliki pekerjaan.

6. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja dan Upah Minimum Secara Simultan terhadap Tingkat Pengangguran di DIY Tahun 2009-2015.

Pengangguran di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja dan upah minimum. Faktor-faktor ini selain mempengaruhi tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015 secara parsial dapat juga mempengaruhi tingkat pengangguran secara simultan (bersama-sama). Jika dilihat secara simultan maka akan dapat diketahui seberapa besar sumbangan pengaruh faktor tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di DIY Tahun 2009-2015.



Gambar 2. Paradigma Penelitian

Keterangan:



: Pengaruh secara parsial



: Pengaruh secara simultan

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran.
2. Terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran.
3. Terdapat pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran.
4. Terdapat pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran.
5. Terdapat pengaruh secara bersama-sama tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Penelitian ini akan menguji hipotesis dengan menjelaskan hubungan antara variabel bebas berupa tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum dengan variabel terikat berupa tingkat pengangguran. Menurut Noor (2011: 38) penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Variabel-variabel yang diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih.

B. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data sekunder yang digunakan adalah data panel, yaitu data angka melek huruf, pertumbuhan ekonomi, TPAK, upah minimum, dan tingkat pengangguran dari 5 kabupaten/kota di DIY dengan kurun waktu 7 tahun dari tahun 2009-2015. Data panel merupakan data yang memiliki dimensi waktu dan dimensi ruang. Dalam regresi data panel dilakukan regresi dengan *cross-*

section dan juga data *time series* (Suharjo, 2008: 131). Teknik pengumpulan data yaitu dari sumber-sumber literatur dan arsip-arsip yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di 4 kabupaten dan 1 Kota di DIY.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah diolah menjadi suatu informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data publikasi Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015, Statistik Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009-2015, Statistik Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2015, Statistik Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2015, Statistik Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2015, dan Statistik Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009-2015 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah tingkat pendidikan (X1), pertumbuhan ekonomi (X2), angkatan kerja (X3), dan upah minimum (X4).

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dari penelitian ini adalah tingkat pengangguran (Y).

2. Definisi Operasional

- a. Tingkat pengangguran (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha mandiri. Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat pengangguran terbuka tahunan di 5 kabupaten/kota di DIY yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik DIY periode 2009-2015 yang dinyatakan dalam satuan persen.
- b. Tingkat Pendidikan (X1) yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka melek huruf. Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Angka Melek Huruf diperoleh dari membandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas dikali 100%. Dalam penelitian ini menggunakan AMH tahunan di 5 kabupaten/kota di DIY

yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik DIY periode 2009-2015 yang dinyatakan dalam satuan persen.

- c. Pertumbuhan ekonomi (X2) adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahunan atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di 5 kabupaten/kota di DIY yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik DIY periode 2009-2015 yang dinyatakan dalam satuan persen.
- d. Angkatan kerja (X3) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. TPAK adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja dikali 100%. Dalam penelitian ini menggunakan TPAK tahunan di 5 kabupaten/kota di DIY yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik DIY periode 2009-2015 yang dinyatakan dalam satuan persen.
- e. Upah minimum (X4) yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum kabupaten. Upah minimum kabupaten adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini menggunakan upah minimum kabupaten bulanan di DIY periode 2009-2015 yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi data panel dengan bantuan program STATA.

1. Alat Analisis Data Panel

a. Regresi Data Panel

Regresi data panel ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{it1} + \beta_2 X_{it2} + \beta_3 X_{it3} + \beta_4 X_{it4} + \mu_{it}$$

Keterangan:

Y = Tingkat Pengangguran di DIY (%)

β_0 = Konstanta

β_{1-4} = Koefisien Regresi

X_{it1} = Variabel Angka Melek Huruf pada unit i pada periode t (%)

X_{it2} = Variabel Pertumbuhan Ekonomi pada unit i pada periode t (%)

X_{it3} = Variabel TPAK pada unit i pada periode t (%)

X_{it4} = Variabel Upah Minimum pada unit i pada periode t (Ribu Rupiah)

μ_{it} = *Error* atau variabel pengganggu

b. Estimasi Regresi Data Panel

Dalam teknik estimasi regresi data panel terdapat empat model yang digunakan, yaitu model OLS *pooled*, model *fixed effect least square dummy variabel* (LSDV), model *fixed effect within-group*, dan model *random effect* (Gujarati, 2013: 238-239). Sedangkan Ansofino dkk (2016: 153) menyatakan bahwa terdapat tiga model yang digunakan dalam regresi data panel, yaitu model dengan metode OLS, model *Fixed Effect*, dan

model *Random Effect*. Secara umum terdapat tiga teknik estimasi regresi data panel, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*.

1) *Common Effect Model*

Model ini merupakan model data panel yang paling sederhana, di mana merupakan penggabungan dari data *cross section* dengan data *time series*. Pada metode ini menunjukkan bahwa intersep dan koefisien *slope* konstan sepanjang waktu dan ruang atau mudahnya pada asumsi ini kita mengabaikan dimensi waktu dan ruang (Suliyanto, 2011: 231). Metode yang paling sering dipakai adalah metode regresi *Ordinary Least Square* (OLS).

2) *Fixed Effect Model*

Pendekatan pada model ini menggunakan atau memasukan variabel *dummy* sehingga pendekatan ini juga sering disebut *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Pada model ini menunjukkan bahwa intersep dari masing-masing unit *cross-section* berbeda-beda atau bervariasi. Hal ini juga memberikan asumsi bahwa *slope* tetap sama baik antar individu maupun antar waktu (Kurniawan dkk, 2015: 47).

3) *Random Effect Model*

Model ini mengasumsikan bahwa setiap variabel memiliki intersep yang berbeda, tetapi perbedaan intersep ini bersifat random. Model ini memiliki komponen *error* yang terdiri dari dua komponen

yang merupakan komponen *error* masing-masing unit *cross section* dan kombinasi komponen *error time series* dan *cross section*. (Kurniawan dkk, 2015: 48).

c. Uji Spesifikasi Model

Untuk menentukan dan memilih model data panel yang tepat dari ketiga model estimasi regresi data panel yang ada, maka diperlukan beberapa pengujian sebagai berikut:

1) Uji *Chow*

Uji *Chow* digunakan untuk memilih apakah model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang lebih tepat digunakan. Uji *Chow* dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect Model*

Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai $(Prob>F) < \text{Alpha } 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga model yang tepat *Fixed Effect*. Sebaliknya jika nilai $(Prob>F) > \text{Alpha } 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga model yang tepat *Common Effect*.

2) Uji *Hausman*

Uji *Hausman* digunakan untuk memilih apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang disebut *Error Component Model* (ECM) yang paling tepat digunakan. Uji *Hausman* dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai $(\text{Prob} > \chi^2) < \text{Alpha } 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga model yang tepat *Fixed Effect*. Sebaliknya jika nilai $(\text{Prob} > \chi^2) > \text{Alpha } 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a diolak sehingga model yang tepat *Random Effect*.

3) Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM digunakan untuk memilih apakah model *Common Effect* atau *Random Effect* yang lebih tepat digunakan dalam model persamaan regresi data panel. Metode yang sering dipakai dalam uji *Langrange Multiplier* menggunakan metode Breusch Pagan. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai $(\text{Prob} > \chi^2) > 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Common Effect*, dan sebaliknya apabila nilai $(\text{Prob} > \chi^2) < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Random Effect*.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum menentukan hipotesis, perlu adanya uji prasyarat dengan menggunakan uji asumsi klasik sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal.

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, salah satunya adalah dengan *Skewness-Kurtosis Test*. *Skewness-Kurtosis Test* merupakan uji yang paling reliabel karena akan mendeteksi ketidaknormalan pada jumlah sampel berapapun baik dalam jumlah kecil maupun besar. Jika nilai $(\text{Prob} > \chi^2) < 0,05$ maka variabel-variabel yang akan diteliti tidak berdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai $(\text{Prob} > \chi^2) > 0,05$ maka variabel-variabel yang akan diteliti berdistribusi normal.

b. Uji Multikoleniaritas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai mean VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*-nya. Apabila nilai mean VIF berada di bawah 4 dan nilai *Tolerance* mendekati 1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinearitas (Muhson, 2015: 41).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residua atau dari pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis. Dan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan Uji *Glejser*, untuk melihat apakah ada tidaknya masalah heteroskedastisitas, dengan ketentuan jika signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya $> 0,05$ maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya $< 0,05$ maka terdapat masalah heteroskedastisitas (Muhson, 2015: 49). Selain itu cara lain dengan melihat grafik *scantter plot* antara nilai prediksi variabel terikat dan nilai residualnya.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan di mana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan *lag* pada model, dan atau memasukan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dari varian minimum, sehingga tidak efisien. Untuk menguji ada atau tidaknya gejala autokorelasi dapat digunakan Uji Durbin Watson. Jika nilai D-W, kriterianya adalah jika nilai D-W terletak antara 2 dan 4 (untuk taraf signifikansi 5%) maka tidak terjadi masalah autokorelasi, tetapi jika nilai

berada di luar itu maka bisa terjadi autokorelasi atau tidak dapat ditentukan (Muhson, 2015: 53).

3. Uji Signifikansi

Untuk menentukan tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel bebas terhadap variabel terikat dapat digunakan uji statistik seperti uji koefisien determinasi, uji T, dan uji F.

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) atau *goodness of fit* merupakan nilai yang menyatakan proporsi atau persentase dari total varian variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelas (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) secara bersama-sama. Nilai koefisien R^2 berada diantara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Apabila nilai 1, garis regresi dapat menjelaskan 100% varian pada variabel Y. Sebaliknya apabila bernilai 0, model regresi tersebut tidak dapat menjelaskan variansi sedikitpun pada variabel Y. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independent, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak.

b. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat dengan menganggap

variabel bebas lainnya adalah konstan. Uji t menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

H_0 menyatakan bahwa dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan, X_1 tidak memiliki pengaruh linear terhadap Y . Dasar pengambilan keputusan uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Jika Sig t statistik $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- 2) Jika Sig t statistik $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

c. Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikansi secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

H_a : tidak semua koefisien kemiringan secara simultan adalah nol

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$F = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-1)}$$

Keterangan:

ESS = Explained Sum Squared (jumlah kuadrat yang dijelaskan)

RSS = Total Sum Squear (jumlah total kuadrat)
k = Banyaknya variabel (bebas dan terikat)
n = Banyaknya observasi dalam kurun waktu data

Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika $F > F_{\alpha}(k-1, n-1)$, H_0 ditolak, di mana $F > F_{\alpha}(k-1, n-1)$ adalah nilai kritis pada tingkat signifikansi α serta pembilang df (k-1) dan penyebut df (n-1). Artinya bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini juga dapat dilakukan dengan melihat probabilitas F hitung. Apabila probabilitas $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila probablilitas $F \geq 0,05$ maka gagal menolak H_0 yang artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. DIY memiliki luas wilayah sebesar 3.185,80 km² yang terdiri dari satu kotamadya dan empat kabupaten, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Sleman, Bantul, dan Kulon Progo yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Berdasarkan data BPS tahun 2016, DIY memiliki jumlah penduduk sebesar 3.720.912 jiwa dengan 488.830 jiwa penduduk miskin dan tingkat pengangguran sebesar 2,72%.

Data yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan untuk penelitian ini meliputi data selama 7 tahun yaitu tahun 2009 sampai 2015 sedangkan *cross section* dalam penelitian ini meliputi satu kotamadya dan empat kabupaten (Gunung Kidul, Sleman, Bantul, dan Kulon Progo) di DIY. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran dan variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum di DIY tahun 2009-2015. Deskripsi data variabel dependen dan independen disajikan secara rinci, sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Std. Dev	Minimum	Maksimum
Tingkat Pengangguran (%)	4,404	1,794	1,38	8,07
Angka Melek Huruf (%)	92,356	4,484	84,52	98,43
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,834	0,708	2,69	5,89
TPAK (%)	71,824	5,322	64,38	83,57
UMK (Ribu Rupaih)	923,4	170,951	700	1303

Sumber: hasil olahan stata, data diolah (terlampir)

1. Deskripsi Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka tahunan di 5 Kabupaten/kota di DIY periode 2009-2015.

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka DIY per Kabupaten Tahun 2009-2015

Kabupaten	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gunung Kidul	3,94	4,04	2,23	1,38	1,69	1,61	2,9
Bantul	5,85	5,24	4,39	3,7	3,36	2,57	3
Sleman	7,4	7,71	5,36	5,64	3,28	4,21	5,37
Yogyakarta	8,07	7,41	6,7	5,33	6,45	6,35	5,52
Kulon Progo	4,31	4,18	3,03	3,04	2,85	2,88	3,72
DIY	6	5,69	4,32	3,86	3,24	3,33	4,07

Sumber: BPS (2015), data diolah

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa tingkat pengangguran di DIY terus mengalami penurunan kecuali di dua tahun terakhir yang terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2014 sebesar 3,33% dan sebesar 4,07% di tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh terjadinya perlambatan ekonomi, iklim usaha yang kurang bagus dan meningkatnya jumlah angkatan kerja, di mana banyak anak usia sekolah di pedesaan yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk bekerja, tetapi keadaan tersebut tidak diimbangi oleh penyediaan lapangan

kerja yang memadai terutama di perkotaan sehingga terjadi kenaikan tingkat pengangguran (<http://jogja.tribunnews.com/2015/11/09>).

Persebaran tingkat pengangguran tertinggi di DIY tahun 2015 berada di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 5,52%, dan terendah berada di Kabupaten Gunung Kidul yaitu sebesar 2,9%. Hal ini disebabkan Kota Yogyakarta merupakan pusat ekonomi di mana lowongan pekerjaan dan angkatan kerjanya tidak seimbang sehingga tingkat pengangguran secara kuantitatif tinggi, sedangkan pengangguran di Kabupaten Gunung Kidul rendah karena kebanyakan angkatan kerja langsung bekerja terutama di bidang pertanian, meskipun menjadi pekerja keluarga/tidak dibayar serta masih kurang memadainya pasar tenaga kerja (Publikasi BPS Kab. Gunung Kidul 2016). Selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2009-2015 tingkat pengangguran tertinggi berada di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 8,07% yang terjadi pada tahun 2009 dan tingkat pengangguran terendah terdapat di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 1,38% yang terjadi pada tahun 2012.

Tingkat pengangguran di DIY merupakan masalah yang cukup serius karena berdasarkan data dari BPS komposisi tingkat pengangguran terbuka tertinggi berdasarkan indikator pendidikan disumbangkan oleh tenaga kerja lulusan SMK sebesar 11,41%, SMA sebesar 8,29%, diploma I/II/III sebesar 6,88% dan lulusan universitas sebesar 5,18%. Pemerintah DIY telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran seperti menggelar *job fair*, melakukan pelatihan kerja, peningkatan kompetensi,

pemagangan dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan dari DIY maupun luar DIY (<http://jogja.tribunnews.com/2018/05/05/job-fair-diharapkan-menekan-angka-pengangguran-di-kota-yogya>).

2. Deskripsi Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini diukur melalui angka melek huruf. Angka melek huruf yang digunakan adalah AMH tahunan di 5 Kabupaten/kota di DIY periode 2009-2015.

Tabel 4. Angka Melek Huruf DIY per Kabupaten Tahun 2009-2015

Kabupaten	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gunung Kidul	84,52	84,66	84,94	84,97	85,22	85,47	86,28
Bantul	89,14	91,03	91,23	92,19	92,81	93,11	93,41
Sleman	92,19	92,61	93,44	94,53	95,11	98,31	96
Yogyakarta	97,94	98,03	98,07	98,1	98,43	96,87	98,36
Kulon Progo	89,52	90,69	92	92,04	93,13	93,36	94,78
DIY	90,18	90,84	91,49	92,02	92,86	94,44	94,5

Sumber: BPS (2015), data diolah

Pendidikan merupakan salah satu penentu kemajuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan keterampilan (*skill*) dan kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja dan lingkungan sosial. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menciptakan efektivitas produksi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena hal itulah pendidikan sangat perlu untuk dikembangkan dan ditingkatkan sebagai pendorong pembangunan masa depan bangsa. Dengan bekal pendidikan yang memadai seorang angkatan kerja bisa terserap dalam pasar tenaga kerja dan bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, di mana sekarang ini sudah banyak perusahaan yang

memberikan kualifikasi tertentu untuk pekerjaanya. Tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran suatu daerah, oleh karena itu untuk mendapatkan pekerjaan dibutuhkan pendidikan dan keahlian dari calon pekerja agar bisa terserap dalam dunia kerja dan mengurangi tingkat pengangguran (Iswahyudi Joko Suprayitno dkk, 2016).

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa angka melek huruf DIY dari tahun 2009-2015 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 AMH sebesar 90,18% dan terus meningkat menjadi 94,5% pada tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh berhasilnya program wajib belajar 9 tahun, pemberantasan buta aksara yang dilakukan pemerintah pusat dan program pengembangan pendidikan keaksaraan yang dilakukan pemerintah DIY (http://pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=v_artikel&id=22). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan terus ditingkatkan oleh pemerintah DIY dan masih ada 5,5% penduduk buta huruf yang harus ditangani.

Persebaran angka melek huruf tertinggi di DIY tahun 2015 berada di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 98,36% dan terendah berada di Kabupaten Gunung Kidul yaitu sebesar 86,28%. Kota Yogyakarta memiliki AMH tertinggi disebabkan oleh masyarakatnya yang sudah memiliki kesadaran pentingnya pendidikan, perekonomian yang memadai, dan ketersediaan berbagai fasilitas pendidikan maupun pilihan sekolah (Publikasi BPS Kota Yogyakarta 2015). Sedangkan AMH Kab. Gunung Kidul terendah dikarenakan

masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan seperti masih banyak yang belum menyentuh pendidikan dasar 9 tahun, masalah ekonomi, dan fasilitas pendidikan yang belum memadai (Publikasi BPS Kab. Gunung Kidul 2015). Selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2009-2015 AMH tertinggi DIY berada di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 98,43% yang terjadi di tahun 2013 dan AMH terendah berada di Kab. Gunung Kidul yaitu sebesar 84,52% yang terjadi di tahun 2009.

Angka melek huruf di DIY masih menjadi masalah karena ada 5,5% penduduk yang masih buta huruf. Penduduk yang masih buta huruf ini 75% adalah penduduk berusia 60 tahun ke atas dan 60% di antaranya berjenis kelamin perempuan. Untuk mengatasi permasalahan buta huruf ini pemerintah DIY telah melakukan beberapa usaha seperti melalui kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan, pelatihan tutor, dan bimbingan teknis pendidikan keaksaraan usaha mandiri tematik batik (http://pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=v_artikel&id=43).

3. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan di mana terjadi perkembangan dalam kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan melihat pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, apabila produksi suatu negara meningkat maka permintaan tenaga kerja juga akan meningkat karena

diperlukan banyak tenaga kerja untuk proses produksi dan berakibat terhadap penurunan tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahunan atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di 5 kabupaten/kota di DIY periode 2009-2015.

Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) DIY per Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2015

Kabupaten	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gunung Kidul	4,15	3,64	4,52	4,84	4,97	4,54	4,82
Bantul	3,56	4,37	5,07	5,33	5,46	5,04	4,97
Sleman	4,48	5,08	5,42	5,79	5,89	5,41	5,31
Yogyakarta	4,97	5,52	5,84	5,4	5,47	5,28	5,09
Kulon Progo	2,69	3,61	4,23	4,37	4,87	4,57	4,62
DIY	4,88	4,64	5,21	5,37	5,47	5,17	4,95

Sumber: BPS (2015), data diolah

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi DIY dari tahun 2009-2015 mengalami naik turun. Kenaikan pertumbuhan ekonomi paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,57%, hal ini terjadi karena DIY pada tahun ini sedang mengalami tingkat produktivitas tertinggi setelah kebangkitan dari bencana gempa bumi tahun 2006. Namun, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2010, 2014, dan 2015. Penurunan ini disebabkan dari sisi produksi di mana terjadi penurunan karena disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terutama subkategori tananam pangan. Selain itu terjadi pertumbuhan negatif pada lapangan usaha yang mempunyai kontribusi besar dalam PDRB, seperti

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil serta penyediaan akomodasi, dan perusahaan makanan dan minuman (<http://koran-sindo.com/page/news/2016-02-10/6/60>). Penurunan pertumbuhan ekonomi paling tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,24%, hal ini disebabkan oleh krisis keuangan global yang juga berdampak pada perekonomian di DIY. Rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY sepanjang tahun 2009-2015 adalah sebesar 5,09%.

Persebaran pertumbuhan ekonomi tertinggi DIY tahun 2015 berada di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 5,31% dan terendah berada di Kab. Kulon Progo yaitu sebesar 4,62%. Kab. Sleman memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi karena sektor jasa keuangan dan asuransi berkembang sangat pesat, sektor pertanian yang mulai berkembang dari tahun sebelumnya, dan sektor industri pengolahan yang mendominasi (Publikasi BPS Sleman 2016). Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kab. Kulon Progo rendah disebabkan oleh belum bisa memanfaatkan sumber daya yang ada untuk dikelola dengan baik, seperti belum memanfaatkan berbagai produk pertanian yang menjanjikan seperti vanili, cokelat, dan durian, ternak (kambing etawa), dan wisata alam (https://www.kompasiana.com/cru1s3r/kulon-progo-yang-berbenah-antara-potensi-dan-kontroversi_556b6d812ab0bd1c4ce40f0c). Selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2009-2015 pertumbuhan ekonomi DIY tertinggi berada di Kab. Sleman yaitu sebesar 5,89% yang terjadi pada tahun 2013 dan pertumbuhan ekonomi terendah berada di Kab. Kulon Progo sebesar 2,69% yang terjadi pada tahun 2009.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah DIY telah melakukan peningkatan investasi, mendorong konsumsi masyarakat, melakukan pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kinerja ekspor/impor terutama untuk komoditi tekstil dan meubel (http://krjogja.com/web/news/read/15010/Konsumsi_dan_Investasi_Dorong_Pertumbuhan_Ekonomi_DIY_Naik).

4. Deskripsi Angkatan Kerja

Dalam penelitian ini angkatan kerja yang dimaksud adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK yang digunakan adalah TPAK tahunan di 5 kabupaten/kota di DIY periode 2009-2015.

Tabel 6. TPAK DIY per Kabupaten Tahun 2009-2015

Kabupaten	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gunung Kidul	74,42	73,39	75,93	80,43	77,87	83,57	70,77
Bantul	70,79	70,15	70,96	71,26	66,78	74,26	67,84
Sleman	66,72	67,15	66,07	66,44	65,67	76,55	65,45
Yogyakarta	67,68	66,38	67,05	67,28	64,38	81,02	66,7
Kulon Progo	73,27	73,48	75,17	75,4	75,61	82,33	75,62
DIY	70,23	69,76	70,39	71,52	69,29	71,05	68,38

Sumber: BPS (2015), data diolah

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menggambarkan seberapa banyak tenaga kerja yang tersedia untuk proses produksi. Banyak sedikitnya TPAK suatu daerah akan bermanfaat atau bahkan merugikan tergantung pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. TPAK berpengaruh terhadap tingkat pengangguran karena dengan banyaknya penawaran tenaga kerja yang ada tetapi tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan maka

banyak pekerja yang tidak terserap dalam lapangan pekerjaan dan hanya akan menambah jajaran pengangguran.

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa dari tahun 2009-2015 TPAK DIY mengalami naik turun. TPAK tertinggi DIY terjadi pada tahun 2012 sebesar 71,52 dan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 68,38%. Rata-rata TPAK di DIY sepanjang tahun 2009-2015 sebesar 70,08%. Pada tahun 2015 TPAK tertinggi DIY berada di Kab. Kulon Progo yaitu sebesar 75,62% dan TPAK terendah berada di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 65,45%. Perbedaan TPAK di tiap daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia kerja, komposisi penduduk, dan jumlah lulusan sekolah. Selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2009-2015 TPAK tertinggi di DIY berada di Kab. Gunung Kidul sebesar 83,57% yang terjadi di tahun 2014 dan TPAK terendah berada di Kota Yogyakarta sebesar 64,38% yang terjadi di tahun 2013.

5. Deskripsi Upah Minimum

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang diberikan oleh pengusaha/ perusahaan kepada karyawan/ buruh. Setiap daerah memiliki sistem upah yang berbeda-beda, seperti halnya DIY Sistem upah yang digunakan adalah sistem Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sistem upah ini digunakan dengan maksud untuk mengurangi tingkat kesenjangan di masing-masing kabupaten atau kota. UMK adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/ Kota yang besarnya disesuaikan dengan KHL yang berlaku di daerah yang bersangkutan.

Tabel 7. Nilai Upah Minimum Kabupaten di DIY Tahun 2009-2015 (Ribu Rupiah)

Kabupaten	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gunung Kidul	700	746	808	893	947	989	1108
Bantul	708	756	822	902	993	1126	1164
Sleman	711	761	829	906	1026	1127	1200
Yogyakarta	715	766	836	911	1065	1173	1303
Kulon Progo	704	751	815	897	954	1069	1138

Sumber: BPS (2015), data diolah

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa nilai UMK di DIY dari tahun 2009-2015 terus mengalami kenaikan di setiap kabupaten. Persebaran nilai upah minimum tertinggi tahun 2015 berada di Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp1.303.000 per bulan dan terendah berada di Kab. Gunung Kidul yaitu sebesar Rp1.108.000 per bulan. Selama kurun waktu tujuh tahun dari tahun 2009-2015, DIY pernah memiliki nilai upah minimum tertinggi yaitu sebesar Rp1.303.000 per bulan berada di Kota Yogyakarta di tahun 2015 dan upah minimum terendah yaitu sebesar Rp700.00 per bulan berada di Kab. Gunung Kidul di tahun 2009. Penetapan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Kab/ Kota dengan memperhatikan beberapa faktor dasar seperti kebutuhan hidup pekerja, pertumbuhan ekonomi, harga, keberlangsungan usaha, tingkat inflasi, dll.

B. Analisis Data

1. Penentuan Metode Estimasi Data Panel

Perumusan model penelitian ini merujuk pada penelitian Febryana Rizqi Wasilaputri (2016) karena sesuai dengan metode yang digunakan oleh

peneliti yaitu metode analisis regresi data panel. Model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{it\ 1} + \beta_2 X_{it\ 2} + \beta_3 X_{it\ 3} + \beta_4 X_{it\ 4} + \mu_{it}$$

Keterangan:

Y = Tingkat Pengangguran di DIY (%)
 β_0 = Konstanta
 β_{1-4} = Koefisien Regresi
 $X_{it\ 1}$ = Variabel Angka Melek Huruf pada unit i pada periode t (%)
 $X_{it\ 2}$ = Variabel Pertumbuhan Ekonomi pada unit i pada periode t (%)
 $X_{it\ 3}$ = Variabel TPAK pada unit i pada periode t (%)
 $X_{it\ 4}$ = Variabel Upah Minimum pada unit i pada periode t (Ribu Rupiah)
 μ_{it} = *Error* atau variabel pengganggu

Sebelum melakukan estimasi regresi data panel, terlebih dahulu memilih model estimasi yang tepat dengan melakukan uji spesifikasi model. Ada beberapa uji spesifikasi model yang digunakan untuk memilih model estimasi yang tepat, seperti uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang digunakan untuk memilih apakah model *Common Effect* atau *Random Effect*. Uji *Chow* yang digunakan untuk memilih antara model *Common Effect* atau *Fixed Effect*, dan uji *Hausman* yang digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Berikut ini hasil uji spesifikasi model yang telah dilakukan:

a. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji LM digunakan untuk memilih apakah model *Common Effect* atau *Random Effect* yang lebih tepat digunakan. Uji LM dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Random Effect*

Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai $(\text{Prob} > \chi^2) < \text{Alpha } 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga model yang tepat digunakan adalah *Random Effect*. Sebaliknya jika nilai $(\text{Prob} > \chi^2) > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga model yang tepat digunakan adalah *Common Effect*. Berikut ini disajikan perhitungan dengan model *Common Effect*:

Tabel 8. Pemilihan Model *Common Effect*

Probabilitas	Indikator Uji	Keterangan
0,0000	$(\text{Prob} > F) < \alpha$ (0.0000 < 0,05)	Model <i>Common Effect</i> baik digunakan.

Sumber: Hasil olahan stata (terlampir)

Berdasarkan hasil perhitungan model *Common Effect* pada tabel 8, dapat dilihat nilai probabilitas F yaitu sebesar 0,0000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini baik digunakan. Namun, untuk perbandingan dalam menentukan model mana yang lebih baik, dilakukan pengujian model *Random Effect*. Berikut ini disajikan perhitungan dengan model *Random Effect*:

Tabel 9. Pemilihan Model *Random Effect*

Probabilitas	Indikator Uji	Keterangan
0,0000	$(\text{Prob} > \chi^2) < \alpha$ (0.0000 < 0,05)	Model <i>Random Effect</i> baik digunakan.

Sumber: Hasil olahan stata (terlampir)

Berdasarkan pengujian dengan model *Random Effect* pada tabel 9, dapat dilihat nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0000. Nilai ini sama dengan

nilai probabilitas yang dihasilkan pada uji dengan model *Common Effect*. Maka untuk menentukan model selanjutnya yang digunakan adalah dengan menggunakan uji *Langrange Multiplier*. Berikut ini disajikan hasil uji LM:

Tabel 10. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Probabilitas	Indikator Uji	Hasil	Keterangan
0,0387	(Prob > chi2) < alpha (0.0387 < 0,05)	H ₀ ditolak	Model terpilih <i>Random Effect</i> .

Sumber: Hasil olahan stata (terlampir)

Kriteria yang ditetapkan sebelumnya yaitu menolak H₀ jika probabilitas < alpha, sebaliknya menerima H_a jika probabilitas > alpha. Dari hasil uji LM tersebut, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0387 yang artinya nilai ini kurang dari nilai probabilitas yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H₀, yang berarti bahwa model *Random Effect* lebih baik digunakan.

b. Uji *Chow*

Uji *Chow* digunakan untuk memilih apakah model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang lebih tepat digunakan. Uji *Chow* dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀ : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai (Prob>F) < Alpha 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima sehingga model yang tepat *Fixed Effect*. Sebaliknya jika nilai (Prob>F) > Alpha 0,05 maka H₀ diterima dan H_a ditolak sehingga model yang tepat *Common Effect*. Berdasarkan hasil

perhitungan model *Common Effect* pada tabel 8, dapat dilihat nilai probabilitas F yaitu sebesar 0,0000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini baik digunakan. Namun, untuk perbandingan dalam menentukan model mana yang lebih baik, dilakukan pengujian model *Fixed Effect*.

Disajikan hasil pemilihan model *Fixed Effect* sebagai berikut:

Tabel 11. Pemilihan Model *Fixed Effect*

Probabilitas	Indikator Uji	Keterangan
0,0000	$(\text{Prob} > F) < \alpha$ (0.0000 < 0,05)	Model <i>Fixed Effect</i> baik digunakan.

Sumber: Hasil olahan stata (terlampir)

Berdasarkan pengujian dengan model *Fixed Effect*, dapat dilihat nilai probabilitas F yaitu sebesar 0,0000. Nilai ini sama dengan nilai probabilitas yang dihasilkan pada uji dengan model *Common Effect*. Maka untuk menentukan model selanjutnya yang digunakan dengan uji *Chow*. Berikut ini hasil uji *Chow*.

Tabel 12. Uji *Chow*

Probabilitas	Indikator Uji	Hasil	Keterangan
0,0001	$(\text{Prob} > F) < \alpha$ (0.0001 < 0,05)	H ₀ ditolak	Model terpilih <i>Fixed Effect</i> .

Sumber: Hasil olahan stata (terlampir)

Kriteria yang ditetapkan sebelumnya yaitu menolak H₀ jika probabilitas < alpha, sebaliknya menerima H_a jika probabilitas > alpha. Dari hasil uji *Chow* tersebut, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0001 yang artinya nilai ini kurang dari nilai probabilitas yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H₀, yang berarti bahwa model *Fixed Effect* lebih baik digunakan.

c. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* digunakan untuk memilih apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang disebut *Error Component Model* (ECM) yang paling tepat digunakan. Uji *Hausman* dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai $(\text{Prob} > \chi^2) < \text{Alpha } 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga model yang tepat *Fixed Effect*. Sebaliknya jika nilai $(\text{Prob} > \chi^2) > \text{Alpha } 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a diolak sehingga model yang tepat *Random Effect*. Berdasarkan hasil perhitungan model *Random Effect* pada tabel 9, dapat dilihat nilai probabilitas F yaitu sebesar 0,0000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini baik digunakan. Namun, untuk perbandingan dalam menentukan model mana yang lebih baik, dilakukan pengujian model *Fixed Effect*. Berdasarkan pengujian dengan model *Fixed Effect* pada tabel 11, dapat dilihat nilai probabilitas F yaitu sebesar 0,0000. Nilai ini sama dengan nilai probabilitas yang dihasilkan pada uji dengan model *Random Effect*. Maka untuk menentukan model selanjutnya yang digunakan dengan uji *Hausman*. Berikut ini disajikan hasil dari uji *Hausman*:

Tabel 13. Uji *Hausman*

Probabilitas	Indikator Uji	Hasil	Keterangan
0,0000	(Prob > chi2) < alpha (0.0000 < 0,05)	H ₀ ditolak	Model terpilih <i>Fixed Effect</i> .

Sumber: Hasil olahan stata (terlampir)

Kriteria yang ditetapkan sebelumnya yaitu menolak H₀ jika probabilitas < alpha, sebaliknya menerima H_a jika probabilitas > alpha. Dari hasil uji *Hausman* tersebut, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang artinya nilai ini kurang dari nilai probabilitas yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H₀, yang berarti bahwa model *Fixed Effect* lebih baik digunakan.

2. Uji Asumsi Klasik

Setelah melakukan uji spesifikasi model data panel, untuk mendapatkan model regresi yang tepat maka diperlukan uji asumsi klasik. Suatu model dikatakan baik apabila memenuhi asumsi klasik yaitu bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) atau terhindar dari masalah-masalah normalitas, multikoleniaritas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pengujian asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Normalitas dapat diketahui salah satunya dengan menggunakan uji *Skewness-Kurtosis Test*. Dalam uji *Skewness-Kurtosis Test* normalitas

dapat dilihat jika nilai $(\text{Prob} > \chi^2) < 0,05$ maka variabel-variabel yang akan diteliti tidak berdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai $(\text{Prob} > \chi^2) > 0,05$ maka variabel-variabel yang akan diteliti berdistribusi normal.

Tabel 14. Hasil uji Normalitas

Variable	Indikator Uji ($\text{Prob} > \chi^2$) > sig	Hasil
Tingkat Pengangguran (y)	0,301	Normal
Tingkat Pendidikan (x1)	0,213	Normal
Pertumbuhan Ekonomi (x2)	0,318	Normal
Tenaga Kerja (x3)	0,217	Normal
Upah Minimum (x4)	0,121	Normal

Sumber: hasil olahan stata (terlampir)

Berdasarkan tabel 14, dapat diketahui bahwa semua variabel memenuhi indikator uji $(\text{Prob} > \chi^2) > \text{sig}$, di mana nilai signifikansi sebesar 0,05. Karena nilai $(\text{Prob} > \chi^2)$ semua variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan upah minimum berdistribusi normal.

b. Uji Multikoleniaritas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai mean VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*-nya. Apabila nilai mean VIF berada di bawah 4 maka diambil kesimpulan bahwa model

regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinearitas dan apabila nilai mean VIF berada di atas 4 maka terdapat problem multikolinearitas. Disajikan hasil uji multikoleniaritas:

Tabel 15. Hasil uji Multikoleniaritas

Variable	VIF
Tingkat Pendidikan (x1)	187,99
Pertumbuhan Ekonomi (x2)	128,86
Tenaga Kerja (x3)	43,2
Upah Minimum (x4)	28,9
Mean VIF	97,24

Sumber: hasil olahan stata (terlampir)

Berdasarkan tabel 15, dapat diketahui bahwa nilai mean VIF sebesar 97,24 atau lebih besar dari 4 yang berarti bahwa data variabel tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan upah minimum terdapat masalah multikoleniaritas.

Setelah dilakukan uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdapat masalah yang membuat syarat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) tidak terpenuhi. Karena terdapat masalah multikoleniaritas maka dalam penelitian ini peneliti kemudian tidak menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) tetapi menggunakan metode GLS (*Generalized Least Square*). Metode *Generalized Least Square* (GLS) digunakan apabila asumsi-asumsi yang disyaratkan oleh metode OLS seperti, homoskedastisitas dan nonautokorelasi tidak terpenuhi. Karena telah menggunakan metode Metode *Generalized Least Square* (GLS) maka untuk selanjutnya dalam penelitian ini tidak perlu melakukan uji heteroskedastisitas dan autokorelasi lagi karena sudah dianggap

tidak terjadi masalah multikoleniaritas, heteroskedastisitas, maupun masalah autokorelasi. Namun, untuk mendukung hasil uji dari metode GLS (*Generalized Least Square*) peneliti juga harus menggunakan metode SUR (*Seemingly Unrelated Regression*) untuk mengetahui seberapa besar variabel terikat (tingkat pengangguran) dipengaruhi oleh variabel bebas (tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum) atau yang biasanya disebut dengan R-squared. Berikut ini disajikan hasil uji GLS dan SUR:

Tabel 16. Hasil Uji Metode GLS (*Generalized Least Square*) dan Hasil Uji Metode SUR (*Seemingly Unrelated Regression*)

Variable	Coefficient	Prob.
C	-9.302	0.119
Tingkat Pendidikan (x1)	0.281	***0.000
Pertumbuhan Ekonomi (x2)	-0.035	0.314
Angkatan Kerja (x3)	-0.100	**0.011
Upah Minimum (x4)	-0.004	***0.000
R-squared	0.705	
Prob(F-statistic)	0.000	
Obs	35	

Sumber: output stata, diolah (terlampir)

Keterangan:

***signifikansi pada 1%

**signifikansi pada 5%

3. Uji Signifikansi

Untuk menentukan tingkat signifikansi dalam penelitian ini dari masing-masing koefisien regresi variabel bebas terhadap variabel terikat dapat digunakan uji signifikansi seperti uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t), uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F), dan uji Koefisien Determinasi (R^2).

a. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui mengenai pengujian signifikansi dari masing-masing variabel bebas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

Hipotesis statistik yang diajukan sebagai berikut:

H_0 : tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

H_a : tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

Berdasarkan tabel 16 diperoleh hasil estimasi variabel tingkat pendidikan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 dengan koefisien sebesar 0,2816952. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dengan hubungan positif $\{(P>|z|) < \text{sig } 0,05\}$. Hipotesis yang diajukan menolak H_0 atau menerima H_a yang artinya secara sistematis tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

- 2) Pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

Hipotesis statistik yang diajukan sebagai berikut:

H_0 : pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

H_a : pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

Berdasarkan tabel 16 diperoleh hasil estimasi variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,314 dengan koefisien sebesar -0,035. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015 $\{(P>|z|) > \text{sig } 0,05\}$. Hipotesis yang diajukan menerima H_0 atau menolak H_a yang artinya secara sistematis pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran.

- 3) Angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

Hipotesis statistik yang diajukan sebagai berikut:

H_0 : angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

H_a : angkatan kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

Berdasarkan tabel 16 diperoleh hasil estimasi variabel angkatan kerja memiliki nilai probabilitas sebesar 0,011 dengan koefisien sebesar -0,100. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel angkatan

kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dengan hubungan negatif $\{(P>|z|) < \text{sig } 0,05\}$. Hipotesis yang diajukan menolak H_0 atau menerima H_a yang artinya secara sistematis angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

- 4) Upah minimum terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

Hipotesis statistik yang diajukan sebagai berikut:

H_0 : upah minimum tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

H_a : upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

Berdasarkan tabel 16 diperoleh hasil estimasi variabel upah minimum memiliki nilai Probabilitas sebesar 0,000 dengan koefisien sebesar -0,004. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dengan hubungan negatif $\{(P>|z|) < \text{sig } 0,05\}$. Hipotesis yang diajukan menolak H_0 atau menerima H_a yang artinya secara sistematis upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

b. Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F).

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikansi secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_0 : tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

H_a : tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 16 dapat diketahui bahwa variabel independen (tingkat pendidikan (AMH), Pertumbuhan Ekonomi, angkatan kerja (TPAK), dan upah minimum) mempunyai nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen (tingkat pendidikan (AMH), Pertumbuhan Ekonomi, angkatan kerja (TPAK), dan upah minimum) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Berdasarkan hipotesis yang diajukan menolah H_0 dan menerima H_a yang berarti secara

sistematik bahwa semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 16, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,7056 atau 70,56%. Hal ini menunjukkan bahwa 70,56% tingkat pengangguran dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan (AMH), pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja (TPAK), dan upah minimum (UMK). Sedangkan sisanya sebesar 29,44% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Estimasi Model Regresi

Estimasi model dalam penelitian ini menggunakan data panel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran. Berdasarkan tabel 16 dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini diperoleh hasil persamaan estimasi untuk model tingkat pengangguran sebagai berikut:

$$TP = -9,3022 + 0,2816 AMH - 0,0356 PE - 0,1004 TPAK - 0,0045 UMR + e$$

Dari hasil persamaan ini menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran sebesar 0,281 dan signifikan. Berarti bahwa setiap peningkatan angka melek huruf sebesar 1% akan menaikkan tingkat pengangguran sebanyak 0,281%. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran sebesar -0.035 dan tidak signifikan.

Berarti bahwa tidak ditemukan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran dalam penelitian ini. Pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran sebesar -0.100 dan signifikan. Berarti bahwa setiap peningkatan angkatan kerja (TPAK) sebesar 1% akan menurunkan tingkat pengangguran sebanyak 0,100%. Pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran sebesar -0.004 dan signifikan. Berarti bahwa setiap peningkatan upah minimum sebesar 1% akan menurunkan tingkat pengangguran sebanyak 0,004%.

C. Pembahasan

Setelah dilakukan uji signifikansi dan estimasi model maka dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran. Berdasarkan tabel 18 interpretasi hasil regresi data panel pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015, adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran di DIY Tahun 2009-2015

Hasil uji signifikansi pertama tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015 adalah berpengaruh signifikan. Berdasarkan uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t) diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien sebesar 0,281. Dengan demikian menolak H_0 atau menerima H_a yang artinya secara sistematis tingkat

pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang ada, yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Hasil penelitian yang telah dilakukan mendukung temuan dari Imrotus dan Hendry (2013) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, di mana setiap 1% kenaikan tingkat pendidikan terjadi peningkatan tingkat pengangguran sebesar 1,159%. Begitu juga dalam penelitian Anggun (2013) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terdidik, di mana setiap 1% kenaikan tingkat pendidikan terjadi peningkatan tingkat pengangguran terdidik sebesar 0,873%. Hasil ini juga menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

Secara teoritik tingkat pendidikan dapat mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran. Untuk melihat kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, apabila tingkat pendidikan tinggi maka dianggap memiliki kualitas SDM yang baik. Tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan tinggi berarti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, hal ini memberikan peluang bagi tenaga kerja untuk terserap dalam lapangan kerja di mana sekarang ini banyak perusahaan/pengusaha mulai memperhatikan kualitas tenaga kerjanya. Selain itu tenaga

kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang nantinya dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran.

Namun, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan (AMH) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015, yang berarti bahwa apabila angka melek huruf naik maka tingkat pengangguran akan mengalami kenaikan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa semakin tinggi angka melek huruf maka tingkat pengangguran akan menurun. Keadaan ini dapat disebabkan karena angka melek huruf DIY dari tahun 2009-2015 tertinggi tersebar di daerah Kab.Sleman dan Kota Yogyakarta. Dua daerah ini merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kab.Sleman sebesar 5,31% dan Kota Yogyakarta sebesar 5,09%, di mana daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dianggap memiliki kemampuan finansial tinggi yang digunakan untuk membiayai pendidikan mereka yang cukup tinggi, selain itu mereka juga memiliki kemampuan untuk memilih pekerjaan dan waktu kerja mereka, karena meskipun mereka tidak bekerja tetapi kebutuhan mereka masih bisa tetap terpenuhi, namun hal ini akan berakibat pada kenaikan tingkat pengangguran. Sedangkan untuk daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi rendah identik dengan penduduk yang memiliki kemampuan finansial yang rendah dan tingkat pendidikan yang rendah. Bagi penduduk dengan tingkat

pengangguran rendah tidak memiliki kemampuan untuk memilih untuk tidak bekerja karena tuntutan tanggung jawab keluarga, di mana mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Penelitian ini juga dibuktikan dengan data tingkat pengangguran di Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki tingkat pengangguran yang relatif lebih tinggi dari daerah lainnya.

Selain faktor ekonomi, angka melek huruf yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran dikarenakan adanya *mismatch*. *Mismatch* merupakan kesenjangan antara jumlah pekerja menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dengan kebutuhan pekerja untuk jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan (keahlian) tertentu di pasar kerja. *Mismatch* yang terjadi yaitu *overeducation*, yaitu di mana pendidikan pekerja yang bekerja di lapangan usaha atau jenis pekerjaan tertentu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pendidikan yang dibutuhkan di suatu lapangan usaha tertentu. *Undereducation* yaitu suatu keadaan di mana pendidikan tenaga kerja yang bekerja di lapangan usaha/jenis pekerjaan tertentu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pendidikan yang dibutuhkan di suatu lapangan usaha tertentu.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di DIY Tahu 2009-2015

Hasil uji signifikansi kedua tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015 adalah tidak

berpengaruh signifikan. Berdasarkan uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t) diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,314 > 0,05$ dengan koefisien sebesar $-0,035$. Dengan demikian menerima H_0 atau menolak H_a yang artinya secara sistematis pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang ada, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hasil penelitian yang telah dilakukan mendukung temuan dari Nina (2016) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dengan hubungan yang menunjukkan nilai positif terhadap jumlah pengangguran di DIY tahun 1986-2015. Hasil tersebut juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori yang selama ini berlaku, di mana seharusnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan di mana terjadi perkembangan dalam kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya produksi barang dan jasa. Jadi apabila semakin besar permintaan, semakin banyak pula barang dan jasa yang akan diwujudkan. Ketika terjadi kenaikan produksi ini akan menambah penggunaan tenaga kerja, dengan penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian maka dapat mengurangi tingkat pengangguran, seperti teori yang dikemukakan oleh Sukirno (2011:13), yaitu kekurangan permintaan agregat adalah faktor penting yang menimbulkan pengangguran. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, standar kehidupan juga

akan membaik karena output lebih cepat tumbuh daripada jumlah penduduk dan seluruh lapisan masyarakat akan berubah menjadi masyarakat industri modern akibat dari meningkatnya output perkapita. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti SDA, SDM, modal, teknologi, dan sistem sosial (Sukirno, 2011: 429) yang nantinya juga akan membawa pengaruh ke dalam masyarakat.

Dilihat dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, faktor teknologi adalah faktor yang memiliki kemungkinan besar mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti permesinan dan komputer dapat menggantikan peran tenaga kerja manusia dan peran pikiran manusia dimana permintaan tenaga kerja akan berkurang dan menaikkan tingkat pengangguran. Namun, bagi pengusaha/ perusahaan hal ini merupakan hal yang sangat menguntungkan karena dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Untuk meningkatkan produksi barang dan jasa salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan investasi. Berdasarkan data BPS tahun 2015 dapat dilihat bahwa rata-rata investasi terbesar dilakukan pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 14,96%, di mana lapangan usaha tersebut tidak banyak menyerap tenaga kerja, meskipun mampu membuka lapangan pekerjaan tetapi pasti hanya membutuhkan tenaga ahli saja. Sedangkan investasi untuk industri pengolahan sebesar 7,38%, konstruksi sebesar 7,36%, dan pertanian sebesar 1,21%.

Pertumbuhan ekonomi di DIY berdasarkan data BPS tahun 2015 didorong oleh lapangan usaha seperti industri pengolahan, informasi dan komunikasi, konstruksi, penyediaan akomodasi, dan industri makanan dan minuman, tetapi lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha yang masih belum bisa menyerap banyak angkatan kerja.

Selain faktor teknologi dan investasi, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran juga disebabkan oleh iklim usaha yang sedang tidak bagus yaitu ditandai dengan terjadinya perlambatan ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga banyak perusahaan atau pengusaha melakukan PHK terhadap pekerjanya untuk mengurangi biaya produksi, namun hal tersebut mengakibatkan naiknya tingkat pengangguran (<https://ekonomi.kompas.com>).

3. Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran di DIY Tahun 2009-2015

Hasil uji signifikansi ketiga tentang pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015 adalah berpengaruh signifikan. Berdasarkan uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t) diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,011 < 0,05$ dengan koefisien sebesar $-0,100$. Dengan demikian menolak H_0 atau menerima H_a yang artinya secara sistematis angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang ada, yang menyatakan bahwa angkatan kerja berpengaruh dan signifikan

terhadap tingkat pengangguran. Hasil penelitian tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Heru (2015) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa pertumbuhan angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan dengan hubungan yang menunjukkan nilai negatif terhadap tingkat pengangguran di Kota Surabaya.

Untuk mengetahui perkembangan angkatan kerja suatu daerah dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan seberapa banyak tenaga kerja yang tersedia untuk proses produksi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa angkatan kerja (TPAK) di DIY tahun 2009-2015 memiliki hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran yang berarti bahwa jika terjadi peningkatan TPAK akan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh Waytinski (Kusnendi, 2015: 2.28-2.30) yaitu hipotesis yang disebut sebagai *discourage worker hypothesis* dan *additional worker hypothesis*. Hipotesis pertama menyebutkan bila perekonomian memburuk yang ditandai dengan naiknya tingkat pengangguran, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan meningkat pada umur 25-60 tahun dan akhirnya menurun lagi pada umur tua. Dengan kata lain TPAK cenderung mengikuti siklus hidup. Hipotesis kedua menyatakan bahwa semakin tua umur seseorang, tanggung jawabnya terhadap keluarga menjadi semakin besar. Kelompok umur 25-60 tahun merupakan masa-masa seseorang untuk dituntut lebih produktif karena tuntutan tanggung jawab terhadap keluarga. Oleh karena itu TPAK

kelompok umur 25-60 tahun tinggi dan relatif stabil, namun setelah mencapai umur tua (60 tahun lebih) TPAK pada kelompok ini akan menurun. Keadaan ini dapat dilihat dari TPAK DIY tahun 2009-2015 tertinggi tersebar di Kab. Gunung Kidul dan Kulon Progo yang termasuk daerah pedesaan dan masyarakatnya masih bekerja di sektor pertanian, di mana sektor ini menjadi sektor penyerap tenaga kerja paling banyak sehingga banyak tenaga kerja yang langsung dapat terserap dalam sektor pertanian. Selain itu meskipun TPAK di Kab. Gunung Kidul dan Kulon Progo tinggi tetapi merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terendah dari kabupaten lainnya. Jadi, meskipun TPAK di DIY mengalami kenaikan tetapi kenaikan tersebut dapat diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian terutama di Kab. Gunung Kidul dan Kulon Progo, di mana tenaga kerja di daerah tersebut dapat langsung bekerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Selain itu terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 menjadi 5,17% dan tahun 2015 menjadi 4,95% yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi mendorong para tenaga kerja yang tidak bekerja untuk bekerja, bahkan yang awalnya bukan termasuk angkatan kerja harus bekerja. Angkatan kerja yang awalnya tidak bekerja menjadi memiliki tanggung jawab untuk membantu perekonomian keluarga dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi tetapi tingkat pengangguran dapat berkurang.

4. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Di DIY Tahun 2009-2015

Hasil uji signifikansi keempat tentang pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015 adalah berpengaruh signifikan. Berdasarkan uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t) diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien sebesar -0.004 . Dengan demikian menolak H_0 atau menerima H_a yang artinya secara sistematis upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang ada, yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Hasil penelitian yang telah dilakukan tidak sesuai dengan penelitian Nina (2016) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dengan hubungan positif, di mana setiap 1% kenaikan upah minimum akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 1,367%. Begitu juga dalam penelitian M. Shun Hajja dan Nugroho (2013) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dengan hubungan positif, di mana setiap 1% kenaikan upah minimum akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 0,26%.

Secara teoritis kenaikan upah akan mengakibatkan jumlah penawaran tenaga kerja bertambah, namun bagi pengusaha/ perusahaan akan menurunkan

kuantitas tenaga kerja yang diterima. Hal ini disebabkan apabila upah naik maka harga tenaga kerja naik, jadi perusahaan/ pengusaha untuk mempertahankan keuntungan akan lebih baik mengganti tenaga kerja dengan input yang lebih murah. Jika terjadi penurunan kuantitas penerimaan tenaga kerja maka akan berakibat pada naiknya tingkat pengangguran.

Dalam penelitian ini ditemukan keadaan yang sesuai dengan teori Phillips, yaitu di mana upah minimum di DIY tahun 2009-2015 berpengaruh secara signifikan tetapi dengan hubungan bersifat negatif, atau apabila terjadi peningkatan upah minimum maka akan berakibat pada penurunan tingkat pengangguran. Teori Phillips menyebutkan bahwa ada hubungan negatif antara persentase kenaikan upah dengan tingkat pengangguran. Ketika tingkat kenaikan upah tinggi pengangguran cenderung rendah dan ketika tingkat kenaikan upah rendah pengangguran cenderung tinggi (Kusnendi, 2015: 3.40). Hal ini disebabkan karena kenaikan upah memberikan efek yang baik terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Kenaikan upah yang terjadi setiap tahun di DIY dapat mengurangi tingkat pengangguran karena dengan adanya kenaikan upah dirasakan dapat mencukupi kebutuhan para pekerja sehingga dengan kenaikan upah minimum ini tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan maupun menganggur langsung menerima tawaran kerja dan tidak pilih-pilih pekerjaan. Keadaan ini akan berakibat pada penurunan tingkat pengangguran. Sebaliknya jika terjadi penurunan upah tenaga kerja akan memilih-milih pekerjaan sesuai dengan upah yang cocok untuk memenuhi

kebutuhannya. Selain itu ada juga perusahaan yang menjadikan kenaikan upah sebagai strategi penting dalam meningkatkan kinerja para pekerjanya, memelihara kelangsungan satuan kerja, dan untuk mencapai sasaran kerja melalui produktivitas yang tinggi yang nantinya juga akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Pemerintah dalam hal ini juga ikut membantu dengan cara memberikan kemudahan kepada pengusaha/ perusahaan yang merasa terbebani dengan kenaikan upah dengan mengajukan permohonan penangguhan pembayaran kenaikan UMK.

Penetapan UMK di DIY sebenarnya masih mengalami masalah di mana belum semua masyarakat bisa menikmati UMK itu sendiri, terutama masyarakat kecil/berpendapatan menengah ke bawah. Karena DIY bukan merupakan kota industri maka biaya hidup di DIY termasuk murah karena hanya mengandalkan sektor pariwisata, jadi masih banyak juga masyarakat yang menerima upah di bawah UMK (<https://www.merdeka.com/khas/di-balik-biaya-hidup-murah-kota-yogyakarta-sisi-lain-yogyakarta-3.html>).

5. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Secara Simultan terhadap Tingkat Pengangguran di DIY Tahun 2009-2015

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 16 dapat diketahui bahwa variabel independen (tingkat pendidikan (AMH), Pertumbuhan Ekonomi, angkatan kerja (TPAK), dan upah minimum) mempunyai nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian hasil

analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen (tingkat pendidikan (AMH), Pertumbuhan Ekonomi, angkatan kerja (TPAK), dan upah minimum) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Berdasarkan hipotesis yang diajukan menolah H_0 dan menerima H_a yang berarti secara sistematis bahwa semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi tingkat pengangguran.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dengan sebaik-baiknya, namun karena masih adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, sehingga dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan, yaitu:

1. Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti berasal dari publikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang mana biasanya terdapat perbedaan data, sehingga peneliti harus membandingkan data dengan publikasi lain yang dikeluarkan BPS sebagai penguat data.
2. Dalam penelitian ini sistem pengupahan UMK di DIY baru digunakan pada tahun 2013, sehingga untuk melengkapi data peneliti menggunakan teknik interpolasi data. Interpolasi data digunakan untuk memperkirakan data UMK sebelum tahun 2013 yang belum diketahui.
3. Periode penelitian yang digunakan masih terlalu singkat yaitu 7 tahun sehingga hasil penelitian kurang representatif.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 5 kabupaten/kota di DIY selama periode 2009-2015 yang berfokus pada pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran, berdasarkan pembahasan hasil analisis pada bab sebelumnya, penelitian menghasilkan beberapa simpulan:

1. Tingkat pendidikan dengan indikator angka melek huruf memiliki pengaruh signifikan dengan hubungan positif terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015 dengan koefisien 0,281. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan angka melek huruf sebesar 1% akan menaikkan tingkat pengangguran sebesar 0,281%.
2. Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015 dengan koefisien -0,035. Hal ini berarti bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran.
3. Angkatan kerja dengan indikator TPAK memiliki pengaruh signifikan dengan hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015 dengan koefisien -0,100. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan TPAK sebesar 1% akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,100%.

4. Upah minimum dengan indikator UMK memiliki pengaruh signifikan dengan hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015 dengan koefisien -0,004. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan UMK sebesar 1% akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,004%.
5. Tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak terkait (dalam hal ini pemerintah) sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ditemukan kabupaten/kota yang memiliki tingkat angka melek huruf yang tinggi namun memiliki tingkat pengangguran yang tinggi pula. Hendaknya pemerintah mampu mengontrol keseimbangan antara jumlah lulusan yang siap masuk ke pasar kerja dengan tenaga kerja berpendidikan tinggi yang dibutuhkan industri atau perusahaan.
2. Hendaknya pemerintah lebih mengembangkan sektor usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menambah investasi pada industri padat karya.
3. Hendaknya pemerintah bisa mengembangkan perekonomian di semua sektor usaha agar semua lapisan masyarakat dapat terserap dalam pasar kerja.

4. Hendaknya pemerintah dalam menetapkan upah lebih memperhatikan kondisi pekerja dan perusahaan agar tidak terjadi pengurangan kesejahteraan bagi pekerja dan tidak merugikan bagi perusahaan.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan periode yang lebih panjang agar hasil yang diperoleh lebih representatif serta menggunakan atau menambah variabel lain seperti inflasi, investasi, kurangnya keterampilan, kurangnya informasi, dan kurangnya lapangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran sehingga dapat membantu dalam pengambilan kebijakan terkait tingkat pengangguran.

DATAR PUSTAKA

- Ansofino dkk. 2016. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Diakses dari <http://www.bps.go.id> pada tanggal 13 Desember 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Diakses dari <http://yogyakarta.bps.go.id> pada tanggal 13 Desember 2017.
- BPS Daerah Istimewa Yogyakarta. 2016. *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2016*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS Kabupaten Bantul. 2016. *Statistik Daerah Kabupaten Bantul 2016*. Yogyakarta. BPS Kabupaten Bantul.
- BPS Kabupaten Bantul. 2016. *Statistik Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*. Yogyakarta: BPS Kabupaten Bantul.
- BPS Kabupaten Gunung Kidul. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunungkidul 2012 - 2016*. Yogyakarta: BPS Kabupaten Kabupaten Gunung Kidul.
- BPS Kabupaten Gunung Kidul. 2016. *Statistik Daerah Kabupaten Gunung Kidul 2016*. Yogyakarta: BPS Kabupaten Kabupaten Gunung Kidul.
- BPS Kabupaten Kulon Progo. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kulon Progo 2011-2015*. Yogyakarta: BPS Kabupaten Kulon Progo.
- BPS Kabupaten Kulon Progo. 2016. *Statistik Daerah Kabupaten Kulon Progo 2016*. Yogyakarta: BPS Kabupaten Kulon Progo.
- BPS Kabupaten Sleman. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman 2012-2016*. Yogyakarta: BPS Kabupaten Sleman.
- BPS Kabupaten Sleman. 2016. *Statistik Daerah Kabupaten Sleman 2016*. Yogyakarta: BPS Kabupaten Sleman.
- BPS Kota Yogyakarta. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut lapangan Usaha Kota Yogyakarta 2012-2016*. Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta.

- BPS Kota Yogyakarta. 2016. *Statistik Daerah Kota Yogyakarta 2016*. Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta.
- Cahyani, Nina. 2016. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, Inflasi, dan Investasi terhadap Jumlah Pengangguran di DIY Tahun 1986-2015.” Skripsi: Universitas Sanata Dharma.
- Depdikbud. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Gilarso, T. 2001. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C Porter. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2 (Terjemahan Raden Carlos Mangunsong)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasbullah. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Heru Anggoro, Moch. 2015. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Surabaya.” *Jurnal: Ekonomi* Volume 3 Nomor 3 hal 9.
- I, Heni. 2013. “Penuntsan Buta Aksara di Daerah Istimewa Yogyakarta” Diakses dari http://pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=v_artikel&id=22 pada tanggal 21 Mei 2018.
- I, Heni. 2013. “Upaya Memaksimalkan Masyarakat Melek Aksara di DIY” Diakses dari http://pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=v_artikel&id=43 pada tanggal 21 Mei 2018.
- Jhigan. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Joko Suprayitno, Iswahyudi dkk. 2015. “Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Jumlah Pengangguran di Kota Semarang.” Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Julianto, Pramida. 2017. “Agustus 2017, jumlah pengangguran menjadi 7,04 juta orang.” Diakses dari <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/06/153940126/agustus-2017-jumlah-pengangguran-naik-menjadi-704-juta-orang> pada tanggal 1 Januari 2018.

- Julianto, Pramida. 2018. "BPS: Penduduk Miskin Turun 1,19 Juta Orang di 2017." Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/152145126/bps-penduduk-miskin-turun-119-juta-orang-di-2017> pada tanggal 7 Juni 2018.
- Kembar Sari, Anggun. 2013. "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat." Jurnal: Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Padang hal 6-7.
- Kemenkumham. 2008. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 47, Tahun 2008, Tentang Wajib Belajar.*
- Kemenkumham. 2013. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 33, Tahun 2013, tentang Perluasan Kesempatan Kerja.*
- Kemenperin. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 13, Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.*
- Kemnakertrans. 1990. *Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan Upah.*
- Kemnakertrans. 1999. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomer: PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum.*
- Kompasiana. 2015. "Kulon Progo yang Berbenah, antara Potensi dan Kontroversi" Diakses dari https://www.kompasiana.com/cru1s3r/kulon-progo-yang-berbenah-antara-potensi-dan-kontroversi_556b6d812ab0bd1c4ce40f0c pada tanggal 22 Mei 2018.
- Kurniawan, Asep Egi dkk. 2015. "Model Regresi Data Panel Berganda Contoh Kasus: Data Hubungan Valuasi Cum Deviden Price (CPD) yang diduga dipengaruhi oleh Laba Earning per Share (EPS) dan Nilai Buku Ekuitas Book Value (BV) pada Tahun 1991-2000". Jurnal: EurekaMatika, Vol. 3, No. 1, 2015 hal 46.
- Kusnendi. 2015. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam.* Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Mankiw N, Gregory dkk. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro.* Jakarta: Salemba Empat.
- Moch, Ardiansyah. 2017. "Meski Menurun, Angka Pengangguran di Jatim masih 839.280 Orang". Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/meski-menurun-angka-pengangguran-di-jatim-masih-839280-orang.html> pada tanggal 27 Juni 2018.

- Muhson, Ali. 2015. *Pedoman Praktikum Aplikasi Komputer Lanjut*. Yogyakarta: FE UNY.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Payaman. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Priadi, Indra Arief. 2016. "BPS: Kemiskinan Meningkat per September 2015". Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/538159/bps-kemiskinan-meningkat-per-september-2015> pada tanggal 7 Juni 2018.
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sanjaya, Wina. 2006. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Shun Hajji, Muhammad dan Nugroho SBM. 2013. "Analisis PDRB, Inflasi, UMP, dan AMH Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011." Jurnal: Ekonomi dan Bisnis Volume 2, Nomor 3 hal 6-8.
- Siswoyo, Dwi dkk. 2013. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suaidah, Imarotus dan Hendry Cahyo. 2013. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang." Jurnal: Ekonomi, Unesa hal 13-14.
- Suharjo, Bambang. 2008. *Analisis Regresi Terapan dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Suroto. 1986. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Yogyakarta: UGM Press.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Tribunnewsjogja. 2015. "Tingkat Pengangguran di DIY Meningkat Signifikan" Diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2015/11/09/tingkat-pengangguran-di-di-meningkat-signifikan> pada tanggal 21 Mei 2018.
- Tumoutounews. com. 2017. "Jumlah Penduduk Dunia Tahun 2017, Posisi Indonesia?". Diakses dari <https://tumoutounews.com/2017/08/25/download-jumlah-penduduk-dunia-tahun-2017/> pada tanggal 13 Desember 2017.
- Wasilaputri, Febryana Rizqi. 2016. "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014." Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widiyanto, Danar. 2016. "Konsumsi dan Investasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi DIY Naik" Diakses dari http://krjogja.com/web/news/read/15010/Konsumsi_dan_Investasi_Dorong_Pertumbuhan_Ekonomi_DIY_Naik pada tanggal 22 Mei 2018.
- Winarno, Henry H. 2016. "Di Balik Biaya Hidup Murah Kota Yogyakarta". Diakses dari <https://www.merdeka.com/khas/di-balik-biaya-hidup-murah-kota-yogyakarta-sisi-lain-yogyakarta-3.html> pada tanggal 12 Juli 2018.
- Windy dan Kuntandi. 2016. "Ekonomi Turun, Pengangguran Bertambah." Diakses dari http://koran-sindo.com/page/news/2016-02-10/6/60/Ekonomi_Turun_Pengangguran_Bertambah pada tanggal 1 Januari 2018.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DATA PENELITIAN

Kabupaten/ Kota	Tahun	Y (TPT)	X1 (AMH)	Square (X2)	X2 (Pertumbuhan Ekonomi)	X3 (TPAK)	X4 (UMK)
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(Rp)
Gunung Kidul	2009	3.94	84.52	17.22	4.15	74.42	700000
Gunung Kidul	2010	4.04	84.66	13.24	3.64	73.39	746000
Gunung Kidul	2011	2.23	84.94	20.43	4.52	75.93	808000
Gunung Kidul	2012	1.38	84.97	23.42	4.84	80.43	893000
Gunung Kidul	2013	1.69	85.22	24.7	4.97	77.87	947000
Gunung Kidul	2014	1.61	85.47	20.61	4.54	83.57	989000
Gunung Kidul	2015	2.9	86.28	23.23	4.82	70.77	1108000
Bantul	2009	5.85	89.14	12.67	3.56	70.79	708000
Bantul	2010	5.24	91.03	19.09	4.37	70.15	756000
Bantul	2011	4.39	91.23	25.7	5.07	70.96	822000
Bantul	2012	3.7	92.19	28.4	5.33	71.26	902000
Bantul	2013	3.36	92.81	29.81	5.46	66.78	993000
Bantul	2014	2.57	93.11	25.4	5.04	74.26	1126000
Bantul	2015	3	93.41	24.7	4.97	67.84	1164000
Sleman	2009	7.4	92.19	20.07	4.48	66.72	711000
Sleman	2010	7.17	92.61	25.8	5.08	67.15	761000
Sleman	2011	5.36	93.44	29.37	5.42	66.07	829000
Sleman	2012	5.64	94.53	33.52	5.79	66.44	906000
Sleman	2013	3.28	95.11	34.69	5.89	65.67	1026000
Sleman	2014	4.21	98.31	29.26	5.41	76.55	1127000
Sleman	2015	5.37	96	28.19	5.31	65.45	1200000
Yogyakarta	2009	8.07	97.94	24.7	4.97	67.68	715000
Yogyakarta	2010	7.41	98.03	30.47	5.52	66.38	766000
Yogyakarta	2011	6.7	98.07	34.1	5.84	67.05	836000
Yogyakarta	2012	5.33	98.1	29.16	5.4	67.28	911000
Yogyakarta	2013	6.45	98.43	29.92	5.47	64.38	1065000
Yogyakarta	2014	6.35	96.87	27.87	5.28	81.02	1173000
Yogyakarta	2015	5.52	98.36	25.9	5.09	66.7	1303000
Kulon Progo	2009	4.31	89.52	7.23	2.69	73.27	704000
Kulon Progo	2010	4.18	90.69	13.03	3.61	73.48	751000
Kulon Progo	2011	3.03	92	17.89	4.23	75.17	815000
Kulon Progo	2012	3.04	92.04	19.09	4.37	75.4	897000
Kulon Progo	2013	2.85	93.13	23.71	4.87	75.61	954000

Kabupaten/ Kota	Tahun	Y (TPT)	X1 (AMH)	Square (X2)	X2 (Pertumbuhan Ekonomi)	X3 (TPAK)	X4 (UMK)
Kulon Progo	2014	2.88	93.36	20.88	4.57	82.33	1069000
Kulon Progo	2015	3.72	94.78	21.34	4.62	75.62	1138000

LAMPIRAN 2. STASTISTIK DESKRIPTIF

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
y	overall	4.404857	1.794613	1.38	8.07	N = 35
	between		1.607876	2.541429	6.547143	n = 5
	within		1.044794	2.194857	6.314857	T = 7
x1	overall	92.35686	4.484914	84.52	98.43	N = 35
	between		4.710299	85.15143	97.97143	n = 5
	within		1.357525	89.65114	96.06828	T = 7
x2	overall	23.85171	6.416307	7.23	34.69	N = 35
	between		4.994089	17.59571	28.87429	n = 5
	within		4.54196	12.84029	29.98029	T = 7
x3	overall	71.824	5.322482	64.38	83.57	N = 35
	between		4.138036	67.72143	76.62571	n = 5
	within		3.771902	65.96828	84.20257	T = 7
x4	overall	923.4	170.951	700	1303	N = 35
	between		31.56745	884.4286	967	n = 5
	within		168.5337	671.4	1259.4	T = 7

LAMPIRAN 3. MODEL COMMON EFFECT

Source	SS	df	MS	Number of obs = 35		
Model	77.2634807	4	19.3158702	F(4, 30)	=	17.97
Residual	32.2381881	30	1.07460627	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.7056
				Adj R-squared	=	0.6663
Total	109.501669	34	3.22063732	Root MSE	=	1.0366

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
x1	.2816952	.0550022	5.12	0.000	.1693658	.3940247
x2	-.0356098	.0382099	-0.93	0.359	-.1136447	.0424252
x3	-.1004757	.0429327	-2.34	0.026	-.1881559	-.0127956
x4	-.0045954	.0012842	-3.58	0.001	-.0072181	-.0019727
_cons	-9.302277	6.453267	-1.44	0.160	-22.48161	3.877052

LAMPIRAN 4. MODEL RANDOM EFFECT

Random-effects GLS regression	Number of obs	=	35
Group variable: id	Number of groups	=	5
R-sq: within = 0.4210	Obs per group: min	=	7
between = 0.8625	avg	=	7.0
overall = 0.7056	max	=	7

Random effects u_i ~ Gaussian	Wald chi2(4)	=	71.90
corr(u_i, X) = 0 (assumed)	Prob > chi2	=	0.0000

y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
x1	.2816952	.0550022	5.12	0.000	.1738929	.3894976
x2	-.0356098	.0382099	-0.93	0.351	-.1104997	.0392802
x3	-.1004757	.0429327	-2.34	0.019	-.1846222	-.0163293
x4	-.0045954	.0012842	-3.58	0.000	-.0071124	-.0020784
cons	-9.302277	6.453267	-1.44	0.149	-21.95045	3.345894

sigma_u	0
sigma_e	.70572537
rho	0 (fraction of variance due to u_i)

LAMPIRAN 5. UJI LAGRANGE MULTIPLIER (LM)

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

$$y[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]$$

Estimated results:

	Var	sd = sqrt(Var)
y	3.220637	1.794613
e	.4980483	.7057254
u	0	0

Test: Var(u) = 0

chi2(1) = 4.27
Prob > chi2 = 0.0387

LAMPIRAN 6. MODEL *FIXED EFFECT*

Fixed-effects (within) regression	Number of obs	=	35
Group variable: id	Number of groups	=	5
R-sq: within = 0.6511	Obs per group: min =		7
between = 0.4219	avg =		7.0
overall = 0.0598	max =		7
	F(4,26)	=	12.13
corr(u_i, Xb) = -0.2757	Prob > F	=	0.0000
-----+-----			
y	Coef.	Std. Err.	t P> t [95% Conf. Interval]
-----+-----			
x1	.0457272	.1503097	0.30 0.763 -.2632389 .3546932
x2	-.1106058	.0351838	-3.14 0.004 -.1829271 -.0382845
x3	-.0392406	.0335149	-1.17 0.252 -.1081314 .0296502
x4	-.0028689	.0010764	-2.67 0.013 -.0050815 -.0006563
cons	8.287324	13.13548	0.63 0.534 -18.71305 35.2877
-----+-----			

LAMPIRAN 7. Uji *CHOW*

Fixed-effects (within) regression	Number of obs	=	35
Group variable: id	Number of groups	=	5
R-sq: within = 0.6511	Obs per group: min =		7
between = 0.4219	avg =		7.0
overall = 0.0598	max =		7
	F(4,26)	=	12.13
corr(u_i, Xb) = -0.2757	Prob > F	=	0.0000
-----+-----			
y	Coef.	Std. Err.	t P> t [95% Conf. Interval]
-----+-----			
x1	.0457272	.1503097	0.30 0.763 -.2632389 .3546932
x2	-.1106058	.0351838	-3.14 0.004 -.1829271 -.0382845
x3	-.0392406	.0335149	-1.17 0.252 -.1081314 .0296502
x4	-.0028689	.0010764	-2.67 0.013 -.0050815 -.0006563
cons	8.287324	13.13548	0.63 0.534 -18.71305 35.2877
-----+-----			
sigma u	1.8651926		
sigma e	.70572537		
rho	.87476759	(fraction of variance due to u_i)	
-----+-----			
F test that all u_i=0:	F(4, 26) =	9.68	Prob > F = 0.0001

LAMPIRAN 8. UJI HAUSMAN

---- Coefficients ----				
	(b) fe	(B) re	(b-B) Difference	$\sqrt{\text{diag}(V_b - V_B)}$ S.E.
x1	.0457272	.2816952	-.235968	.1398848
x2	-.1106058	-.0356098	-.0749961	.
x3	-.0392406	-.1004757	.0612351	.
x4	-.0028689	-.0045954	.0017266	.

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
 = -1062.58
Prob>chi2 = 0.0000
 (V_b-V_B is not positive definite)

LAMPIRAN 9. UJI NORMALITAS

Skewness/Kurtosis tests for Normality					
Variable	Obs	Pr(Skewness)	Pr(Kurtosis)	adj chi2(2)	Prob>chi2
y	35	0.4444	0.2000	2.40	0.3012
x1	35	0.2980	0.1836	3.09	0.2137
x2	35	0.1613	0.6856	2.29	0.3185
x3	35	0.1714	0.3308	3.05	0.2177
x4	35	0.2788	0.0897	4.21	0.1218

LAMPIRAN 10. UJI MULTIKOLENIARITAS

Variable	VIF	1/VIF
x1	187.99	0.005319
x3	128.86	0.007760
x4	43.20	0.023149
x2	28.90	0.034602
Mean VIF	97.24	

LAMPIRAN 11. METODE GLS (*GENERALIZED LEAST SQUARE*)

Coefficients: generalized least squares
Panels: homoskedastic
Correlation: no autocorrelation

Estimated covariances	=	1	Number of obs	=	35
Estimated autocorrelations	=	0	Number of groups	=	5
Estimated coefficients	=	5	Time periods	=	7
			Wald chi2(4)	=	83.88
Log likelihood	=	-48.22441	Prob > chi2	=	0.0000

	y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
x1		.2816952	.0509221	5.53	0.000	.1818897	.3815008
x2		-.0356098	.0353755	-1.01	0.314	-.1049444	.0337249
x3		-.1004757	.0397479	-2.53	0.011	-.1783802	-.0225713
x4		-.0045954	.0011889	-3.87	0.000	-.0069257	-.0022652
_cons		-9.302277	5.974564	-1.56	0.119	-21.01221	2.407654

LAMPIRAN 12. METODE SUR (*SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION*)

Seemingly unrelated regression

Equation	Obs	Parms	RMSE	"R-sq"	chi2	P
y	35	4	.9597349	0.7056	83.88	0.0000

	y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
y							
x1		.2816952	.0509221	5.53	0.000	.1818897	.3815008
x2		-.0356098	.0353755	-1.01	0.314	-.1049444	.0337249
x3		-.1004757	.0397479	-2.53	0.011	-.1783802	-.0225713
x4		-.0045954	.0011889	-3.87	0.000	-.0069257	-.0022652
_cons		-9.302277	5.974564	-1.56	0.119	-21.01221	2.407654